



**IMPLEMENTASI PSAK NO. 46 PADA PT GARUDA
INDONESIA (PERSERO) Tbk YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Riza Permatasari
022115188

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2020

ABSTRAK

Riza Permatasari. 02215188. Implementasi PSAK NO. 46 Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.

Pembimbing; Yohanes Indrayono dan Patar Simamora

Negara Indonesia seringkali dihadapkan dengan permasalahan dan persoalan khususnya dalam bidang ekonomi, yang terkadang berpengaruh terhadap jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, demi kelancaran pembangunan nasional begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan negara khususnya yang berasal dari sektor pajak. Setiap entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Khusus untuk pajak penghasilan, SAK juga mengatur akan hal tersebut di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan. Tujuan dibuatnya PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya, yaitu adanya beda permanen dan temporer dalam aturan perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut menimbulkan istilah pajak tangguhan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi PSAK No. 46 atas laporan keuangan pada perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan mengetahui implementasi PSAK Indonesia. 46 pada perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Penelitian studi kasus mengenai implementasi PSAK No. 46 ini dilakukan pada salah satu perusahaan sub iisettii transportasi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dan menggunakan data sekunder dengan unit analisis organisasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif *non statistic*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan pengungkapan dan penyajian laporan keuangan terkait pajak penghasilan sesuai dengan standar PSAK No. 46. Sebagaimana segi pengungkapan diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) dan segi penyajian dalam pos-pos akun dalam laporan keuangan.

Kata Kunci: PSAK No. 46, Laporan Keuangan Konsolidasian, Pajak Tangguhan

**IMPLEMENTASI PSAK NO. 46 PADA PT GARUDA INDONESIA
(PERSERO) TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2016-2018**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar *Sarjana Akuntansi*
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Anief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**IMPLEMENTASI PSAK NO. 46 PADA PT GARUDA INDONESIA
(PERSERO) TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2016-2018**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

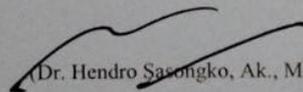
Pada Hari : Kamis Tanggal : 09/07/2020

Riza Permatasari

022115188

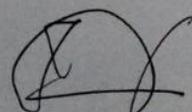
Menyetujui,

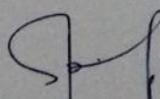
Dosen Penguji,


(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing


(Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., C.A.)


(Patar Simamora, S.E., M.Si.)

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2020

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa iissetiiiii Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan iman, islam, kesehatan serta karunia yang tidak dapat dihitung. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW utusan Allah manusia paling mulia sepanjang zaman kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Alhamdulillah atas izin Allah SWT saya dapat menimba ilmu hingga Perguruan Tinggi dan dapat menyelesaikan Skripsi saya dengan judul “Implementasi PSAK No. 46 Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018”. Adapun penyusunan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, bantuan, dorongan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua, Kakak dan Adik tercinta dan seluruh keluarga besar yang selalu memanjatkan do'anya tak henti-henti dan memberikan dukungan baik berupa moral atau materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku ketua program studi Akuntansi Universitas Pakuan.
4. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan.
5. Bapak Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., C.A. selaku ketua komisi pembimbing yang bersedia memberikan waktu, tenaga dan perhatian kepada penulis serta bimbingan, pengarahan dan juga masukan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Patar Simamora, S.E., M.Si. selaku anggota komisi pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga dan perhatian kepada penulis serta bimbingan, pengarahan dan juga masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama melakukan penyusunan Skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis mendapatkan wawasan yang lebih luas dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Seluruh dosen, staf Tata Usaha dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat yang sudah dianggap keluarga sendiri SONE (Ulfah, Liza, Atiq, Fahira, Nael, Mamaw, Amel, Novi, Dian dan Nurullitha) yang selalu memeberikan dukungan dan selalu memberikan motivasi.

10. LWC Squad Tipoli (Ratna, Uwe, Ii, Rifky, Lubis, Wildan, Kholil, Galih, Kemas dan Maulana) yang berjuang bersama, yang saling mendukung, dan saling mengingatkan.
11. Sahabat tersayang sekaligus saudara tercinta Kaisah , Lekie, Lintang M, Siti Nur Amirah dan Finy Septiani yang selalu ada menemani dalam suka maupun duka.
12. Semua Anak Kelas E Akuntansi 2015 yang berjuang bersama dan yang sudah memberikan pahit manisnya selama duduk di bangku perkuliahan.
13. Teman seangkatan, kakak-kakak, dan adik-adik di Himpunan Mahasiswa Akuntansi FE-Unpak yang sudah memberikan dukungan dan pengetahuannya. *HMA We Are The Best We Are The One.*
14. Seluruh teman, sahabat, kawan, dan orang-orang yang sudah mendukung (yang tidak bisa disebutkan satu-persatu), namun tidak mengurangi rasa hormat saya yang membuat saya menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya dan memberikan balasan kebaikan atas amal ibadah yang telah membantu penulis dalam Skripsi ini, Aamiin.

Sebagai bagian dari proses pembelajaran, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik dari Bapak, Ibu serta teman-teman sebagai pembaca.

Akhir kata penulis, semoga Penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri juga pihak lain dan tidak lupa penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penyusunan Penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bogor, Juli 2020

Penulis

Riza Permatasari

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HAK CIPTA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Maksud Penelitian	5
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Peneliti	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Jenis Pajak	8
2.1.4 Pajak Penghasilan	9
2.1.5 Objek Pajak	9
2.1.6 Pendapatan Kena Pajak Boleh Dikurangkan	13
2.1.7 Pendapatan Kena Pajak Tidak Boleh Dikurangkan	14
2.2 Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK No. 46	15

2.2.1	Pengertian PSAK No. 46	15
2.2.2	Tujuan PSAK No. 46	16
2.2.3	Pajak Kini dan Pajak Tangguhan	16
2.2.3.1	Penyajian Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan	17
2.2.3.2	Pengungkapan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan	18
2.3	Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer	19
2.3.1	Perbedaan Permanen	18
2.3.2	Perbedaan Temporer	19
2.4	Penyajian Laporan Keuangan	20
2.4.1	Pengertian Laporan Keuangan	20
2.4.2	Pengertian Laporan Komersial	20
2.4.3	Laporan Keuangan Fiskal	21
2.4.4	Tujuan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal ..	21
2.4.5	Fungsi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal ..	21
2.5	Hubungan PSAK No. 46 dengan Peraturan Perpajakan	21
2.6	Peneliti Terdahulu	22
2.7	Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Jenis Penelitian	30
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	30
3.2.1	Objek Penelitian	30
3.2.2	Unit Analisis	30
3.2.3	Lokasi Penelitian	30
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	30
3.3.1	Jenis Data Penelitian	30
3.3.2	Sumber Data Penelitian	31
3.4	Operasional Variabel	31
3.5	Metode Pengumpulan Data	31
3.6	Metode Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN	33
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	33
4.2 Kondisi Implementasi PSAK No. 46	34
4.2.1 Implementasi PSAK No. 46 Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	34
4.2.2 Analisis Pos-Pos Pajak Tanggahan terhadap Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi	39
4.3 Implementasi PSAK No. 46 terhadap Kebijakan Akuntansi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	41
4.3.1 Implementasi Akuntansi Perpajakan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk	44
4.4 Pembahasan	50
4.4.1 Kesesuaian dengan Peneliti Sebelumnya	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Terkait Pajak Tangguhan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	Operasional Variabel Implementasi PSAK No. 46 Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018	30
Tabel 4.1	Perbedaan Temporer dan Perbedaan Permanen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018	34
Tabel 4.2	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Pajak Tangguhan Tanggal 1 Jan 2016 dan 31 Des 2016	36
Tabel 4.3	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Pajak Tangguhan Tanggal 1 Jan 2017 dan 31 Des 2017	37
Tabel 4.4	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Pajak Tangguhan Tanggal 1 Jan 2018 dan 31 Des 2018	38
Tabel 4.5	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018	40
Tabel 4.6	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018	41
Tabel 4.7	Penyesuaian Kebijakan Akuntansi Pajak Penghasilan dengan PSAK No. 46 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018	42
Tabel 4.8	Penerapan PSAK No. 46 pada Aspek Penyajian dan Pengungkapan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018	43
Tabel 4.9	Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan	46
Tabel 4.10	Koreksi Fiskal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018	47
Tabel 4.11	Perbedaan Temporer Berdasarkan PSAK dan Ketentuan Perpajakan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016	57
Lampiran 2	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017	59
Lampiran 3	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2018	61
Lampiran 4	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016...	63
Lampiran 5	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017 .	64
Lampiran 6	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2018 ..	65
Lampiran 7	Perpajakan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016	66
Lampiran 8	Perpajakan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017	68
Lampiran 9	Perpajakan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2018	70
Lampiran 10	Persediaan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016	72
Lampiran 11	Persediaan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017	73
Lampiran 12	Persediaan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2018	74
Lampiran 13	Aset lain-lain Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016	75
Lampiran 14	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016	77
Lampiran 15	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017	78
Lampiran 16	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2018	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia seringkali dihadapkan dengan permasalahan dan persoalan khususnya dalam bidang ekonomi, yang terkadang berpengaruh terhadap jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, demi kelancaran pembangunan nasional begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan negara khususnya yang berasal dari sector pajak. Setiap entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh entitas dikenakan pajak setelah dikurangkan dengan biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan. Penghasilan tersebut kemudian akan dikenakan pajak sesuai dengan tariff yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atas seluruh penghasilannya. Tentu untuk kepentingan akuntansi komersial dapat tercermin dalam transaksi bisnis yang dapat memberikan penghasilan (Waluyo,2016).

Di Indonesia, pajak penghasilan dipungut dari wajib pajak melalui *self assessment system* yaitu system pemungutan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan-UU PPh) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban yang dapat memunculkan asset atau liabilitas pajak tangguhan yang harus diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan (Razzaq, 2018).

Laporan keuangan merupakan produk akhir dan serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang disusun dan disajikan secara jelas, jujur, dan benar berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (Herry,2015).

Salah satu unsur penting dalam laporan keuangan adalah pajak penghasilan yang menuntut adanya perlakuan secara khusus, karena jika ada kesalahan maka dapat mengakibatkan masalah bagi perusahaan. Itu sebabnya, pajak penghasilan perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perlu diperhatikan dan dihitung secara hati-hati serta disajikan dengan benar agar tidak menyesatkan penggunaannya (Mely, 2018).

Terdapat dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ekonomi terhadap beberapa alternatif yang tersedia. Sedangkan laporan keuangan fiskal merupakan bagian dari akuntansi yang dalam penyajian laporan keuangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Indonesia mempunyai sebuah standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tujuan dibuatnya SAK ini adalah agar laporan keuangan dapat tersaji secara benar, jelas, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Khusus untuk pajak penghasilan, SAK juga mengatur akan hal tersebut di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan. Tujuan dibuatnya PSAK ini untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya, yaitu adanya perbedaan temporer dan perbedaan permanen dalam aturan perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut menimbulkan istilah pajak tangguhan. Dalam menentukan pendapatan dan biaya, Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan juga memiliki perbedaan. Dari perbedaan inilah atas kedua dasar tersebut maka dilakukanlah koreksi fiskal terhadap laporan keuangan menurut akuntansi atas laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dari koreksi fiskal ini diubah dibuatlah laporan keuangan fiskal (Prawita,2016).

Akibat dari perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal. Dalam perbedaan tersebut ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat temporer. Perbedaan permanen adalah perbedaan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak fiskal. Sedangkan perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada aset atau liabilitas yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Di dalam PSAK 46 perbedaan inilah yang akan dibahas terutama perbedaan yang bersifat temporer. Karena perbedaan temporer dapat menyebabkan pemulihan atau penyelesaian dimasa yang akan datang antara jumlah tercatat aset dan liabilitas, inilah yang menjadi isu utama dalam PSAK No. 46. Sedangkan perbedaan permanen ini tidak perlu disajikan karena tidak akan terpulihkan di masa yang akan datang.

Pajak tangguhan sebagai jumlah Pajak Penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih (*neto*) sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Pengakuan terhadap aset dan liabilitas pajak tangguhan berlandaskan fakta

kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan liabilitas/pembayaran yang menjadi lebih besar atau kecil pada periode mendatang dibanding pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang tidak memiliki konsekuensi pajak.(Waluyo, 2016).

Menurut penelitian terdahulu tidak semua perusahaan menerapkan PSAK No. 46 dengan tepat sesuai dengan penyesuaian yang ada. Windy Nawir Mansur (2012) telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan PT Prima Karya Manunggal” dengan variabel yang digunakan adalah Pajak Penghasilan (PSAK No. 46). Penelitian dilaksanakan pada perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang pengemasan semen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangannya, namun belum sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi atas pajak di masa yang akan datang berupa perubahan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek.

Menurut penelitian Putra (2016) yang berjudul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT MNC Sky Vision KPP Malang” dengan variabel yang digunakan adalah Pajak Penghasilan (PSAK No. 46). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT MNC Sky Vision KPP Malang belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 46. Setelah diterapkannya PSAK No. 46 ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu yang berasal dari perbedaan metode penyusutan aset tetap dan tarif yang digunakan antara perusahaan dengan peraturan perpajakan.

Terkadang suatu perusahaan menghadapi masalah dengan otoritas jasa keuangan dimana entitas terekspos menghadapi resiko harus membayar sejumlah uang yang dikenal dengan istilah denda. Berdasarkan kutipan pada liputan6.com (2019), OJK mengenakan sanksi kepada direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000 dikarenakan laporan keuangan yang salah. Kesalahan dalam laporan keuangan ini lebih ditekankan karena pengakuan pendapatan atas perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi, namun tidak menutup kemungkinan selain kesalahan tersebut juga terdapat kesalahan lain yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Pada dasarnya setiap perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, termasuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kesalahan laporan keuangan yang telah dijabarkan di atas menyebabkan perlu diidentifikasi kembali implementasi PSAK no. 46 pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau biasa dikenal dengan Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di

Indonesia. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk didirikan berdasarkan akta No. 137 tanggal 31 Maret 1950 dari notaris Raden Kadiman. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. 30 tanggal 12 Mei 1950, tambahan No. 36. Perseroan membuka lembaran baru dengan melenggang sebagai perusahaan public setelah melakukan penawaran umum perdana (*initial public offering*) atas 6.335.738.000 saham Perseroan kepada masyarakat pada 11 Februari 2011. Saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 11 Februari 2011 dengan kode GIAA.

Berdasarkan penjelasan di atas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah terdaftar sebagai badan usaha di Indonesia. Yang mengharuskan badan usaha untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dari Laporan Keuangan yang didapatkan ditemukan sebuah GAP yaitu:

Tabel 1.1

Data Terkait Pajak Tangguhan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Periode 2016-2018

(Disajikan USD)

	2016	2017	2018
Aset Pajak Tangguhan	108.493.964	69.511.409	100.148.570
Liabilitas Pajak Tangguhan	2.055.561	1.685.345	996.573
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	9.700.306	(36.325.487)	35.529.049

Sumber data: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018

Berdasarkan 4sset 1.1. diatas, data terlihat nilai aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan pada perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yaitu adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan yang menimbulkan adanya perbedaan laba fiskal dan laba komersial sehingga menimbulkan perbedaan temporer yang menyebabkan adanya pajak tangguhan.

Dari tabel 1.1. data yang disajikan dalam dolar dapat dilihat bahwa aset pajak tangguhan pada perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2016 sebesar 108.493.964, tahun 2017 sebesar 69.511.409 dan tahun 2018 sebesar 100.148.570 dan nilai liabilitas pajak tangguhan mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2016 sebesar 2.055.561, tahun 2017 sebesar 1.685.345 dan pada tahun 2018 sebesar 996.573. Seharusnya jika aset pajak tangguhan meningkat maka liabilitas pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan mengalami penurunan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan teori yang dinyatakan oleh Zain (2007) kenaikan neto 4sset tangguhan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan, sedangkan kenaikan neto kewajiban pajak tangguhan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan, sedangkan kenaikan neto kewajiban pajak tangguhan menyebabkan kenaikan beban pajak perusahaan. Menurut penelitian Fauziyah yang berjudul Analisis Penerapan PSAK No. 46

Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Agung Podomoro Land Tbk (Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017) menyatakan bahwa jika aset pajak tangguhan meningkat maka liabilitas pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dapat dilihat jika penyajian akuntansi pajak masih menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum tepat dalam pelaksanaan akuntansi pajaknya. Hal ini menimbulkan keinginan peneliti untuk mengetahui apakah akuntansi pajak dilaksanakan secara baik pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Maka peneliti ini diberi judul **“Implementasi PSAK NO. 46 Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan masalah melalui Implementasi PSAK No. 46 pada laporan keuangan dan penentuan perbedaan temporer dari pajak tangguhan yang terdapat pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dengan mengimplementasi tingkat kesesuaian dari penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sehingga melalui penentuan tersebut dapat terlihat apakah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah menerapkan PSAK No. 46 dengan tepat dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka rumusan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi PSAK Indonesia. 46 atas laporan keuangan pada perusahaan Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018?
2. Apakah implementasi PSAK Indonesia. 46 pada perusahaan Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 telah sesuai dengan peraturan perpajakan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian adalah untuk mengetahui penyajian laporan laba rugi komperhensif dan laporan posisi keuangan, mengetahui penerapan PSAK No. 46 atas laporan keuangan, mengetahui kesesuaian antara implementasi PSAK No. 46 dengan peraturan perpajakan, menginformasikan akhir dari penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan tersebut.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang tinjauan objek pajak dan akuntansi pajak:

1. Untuk mengetahui implementasi PSAK Indonesia. 46 atas laporan keuangan pada perusahaan Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.
2. Untuk mengetahui implementasi laporan keuangan pada perusahaan Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi evaluasi serta menjadi suatu kebijakan agar dapat memecahkan dan mengantisipasi masalah pada perusahaan terhadap laporan keuangan agar dapat melakukan penyajian dan pelaporan laporan keuangan sesuai dengan PSAK Indonesia. 46 yang telah diatur

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya serta akuntansi perpajakan khususnya, dalam hal untuk pengembalian keputusan pihak manajemen perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2017) pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017) pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Feldmann dalam Resmi (2017) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2017) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini :

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh) penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan , atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan (PPnBM).

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.4 Pajak Penghasilan

“Menurut Undang-Undang Perpajakan Pasal 4 ayat (1), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Kemudian Undang-Undang PPh tahun 2011 pasal 1 mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subjek. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. (Resmi 2017).

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan karena sifatnya pajak penghasilan yang melekat pada setiap wajib pajak.

2.1.5 Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam
 - f. perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

3. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
4. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
5. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
6. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas seperti :
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah undian.

Waluyo (2016) menjelaskan bahwa yang bukan merupakan objek pajak menurut pasal 4 ayat (3) UU PPh adalah:

1. a. Bantuan atau sumbangan yang termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dana yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang diterapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintahan;

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, Koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana 12sset1212 yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana 12sset1212 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan, komanditer yang misalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Bagian obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberi izin usaha;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam 12sset12-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, kemudian ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian ini dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.6 Pendapatan Kena Pajak Boleh Dikurangkan

Pendapatan kena pajak adalah pendapat yang boleh menjadi pengurang dalam menentukan besarnya jumlah pendapatan kena pajak. Menurut Mardiasmo (2018) besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan;
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah
 - f. Premi asuransi
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. Biaya administrasi;
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Iuran kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan;
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau lebih dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

- d. Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil;
- 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 14. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal lima tahun).

2.1.7 Pendapatan Kena Pajak Tidak Boleh Dikurangkan

Selain pendapatan kena pajak boleh dikurangkan, menurut Mardiasmo (2018) terdapat juga pendapatan kena pajak tidak boleh dikurangkan yaitu:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha yang lain menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan piutang;
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam

- bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali:
 - a. Sumbangan yang diperbolehkan dikurangkan;
 - b. Zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk;
 - c. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
 8. Pajak Penghasilan
 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 12. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan
 - a. Dikenakan PPh yang bersifat Final;
 - b. Bukan Objek Pajak.
 13. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang PPh-nya dihitung dengan menggunakan Norma Penghasilan Neto.

2.2. Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK No. 46

2.2.1 Pengertian PSAK No. 46

Di dalam peraturan akuntansi PSAK No. 46 mengatur tentang perlakuan akuntansi pajak penghasilan. Menurut Waluyo (2016) Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 46 menggunakan dasar akrual yang mengatur Pajak Penghasilan yang kurang bayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam masa pajak dan mengakui liabilitas dan aset pajak tanggungan terhadap konsekuensi pajak periode mendatang, atas transaksi yang telah diakui sebagai unsur laba komersial tetapi belum diakuinya sebagai laba fiskal atau sebaliknya. Dasar akrual dalam akuntansi pajak karena 15set15 kepastian peraturan pajak dan digunakan *self assessment system* sebagai dasar pemungutan pajak.

Menurut Waluyo (2016), PSAK No. 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan, yaitu cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk:

1. Nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat liabilitas yang diakui pada neraca perusahaan.
2. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain ada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Menurut Wirawan (2015), PSAK No. 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk PPh saja, khususnya pengakuan, pengukuran dan pencatatan beban pajak, aset dan liabilitas pajak tangguhan dan aset liabilitas pajak kini.

Menurut Harnanto (2016) PSAK No. 46 mendefinisikan beda waktu sebagai suatu perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari suatu 16sset atau kewajiban dengan nilai tercatat yang disajikan dalam neraca, dan akan berakibat timbulnya kewajiban atau utang pajak dan pengurangan penghasilan atau biaya fiskal di masa depan.

2.2.2 Tujuan PSAK No. 46

Dalam buku PSAK No. 46 bagian pendahuluan, tercantum paragraf yang menjelaskan tujuan dari PSAK No. 46 ini di mana pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Isu utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal berikut:

1. Pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset atau liabilitas di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas.
2. Transaksi dan peristiwa lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas.

Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari rugi pajak belum di kompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang terkait dengan pajak penghasilan.

2.2.3 Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Pajak kini diketahui sebagai beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Sedangkan pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat dari adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2016).

Menurut Wirawan (2015), Pajak Kini adalah jumlah PPh terhutang atas penghasilan kena pajak pada suatu periode. Pajak Tangguhan adalah penghitungan pengakuan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul sebagai

akibat adanya perbedaan basis nilai aset atau liabilitas antara perhitungan menurut akuntansi dan menurut perpajakan. Pajak tangguhan terdiri dari:

1. Liabilitas pajak tangguhan yaitu jumlah PPh yang terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba rugi atau fiskal periode mendatang ada saat nilai tercatat liabilitas dilunasi.
2. Aset pajak tangguhan yaitu jumlah PPh yang akan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang (mengurangi laba fiskal di masa yang akan datang) pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas dilunasi dan sisa kompensasi kerugian apabila laba fiskal dimasa datang memadai untuk dikompensasi.

Dwi Martani (2016) menjelaskan tentang pengakuan pajak kini dan pengakuan pajak tangguhan, yang diuraikan sebagai berikut:

Pengakuan Pajak Kini:

1. Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas.
2. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset.
3. Manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dan periode sebelumnya harus diakui sebagai aset.

Untuk Pengakuan Pajak Tangguhan:

1. Pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak yang lebih besar dari penghasilan kena pajak, maka ada pengakuan menurut akuntansi sehingga diakui beban pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan.
2. Pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak yang lebih kecil dari penghasilan kena pajak, maka pajak yang dibayar lebih besar daripada laba menurut akuntansi sehingga diakui aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan.
3. Pada saat perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan di masa mendatang, dan manfaat pajak tangguhan.
4. Aset pajak tangguhan ditinjau untuk memastikan bahwa manfaat di masa mendatang akan diperoleh entitas.

2.2.3.1 Penyajian Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi komersial. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi secara terpisah seperti dijelaskan dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, maka beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal pada laporan keuangan disajikan terpisah/tersendiri.

Entitas dapat melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika:

1. Entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
2. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan PPh yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas terkena pajak yang sama; atau entitas terkena pajak berbeda bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

2.2.3.2 Pengungkapan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan merupakan penyajian informasi yang diperlukan untuk berlangsungnya pasar modal yang efisien secara optimum. Banyaknya informasi yang diungkap tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca tetapi juga standar yang dianggap cukup.

Dalam PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan yaitu bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan-penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) mengungkapkan:

1. Informasi tentang dasar penyusutan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting.
2. Informasi yang disajikan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.
3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Semakin lengkap informasi yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) (*full disclosure*) maka pembaca laporan keuangan akan semakin mengerti kinerja keuangan perusahaan.

2.3 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer

2.3.1 Perbedaan Permanen

Perbedaan permanen (*permanent difference*) timbul sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak/fiskal. Akibat dari perbedaan ini berakibat juga pada laba komersial dan laba fiskal sebagai dasar menghitung pajak yang terutang. Sebagai contoh, pemberian imbalan kepada karyawan dalam bentuk natura, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan tetapi juga tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya bagi Wajib Pajak (Waluyo, 2016).

Sedangkan Siti Resmi (2017) menyatakan bahwa perbedaan permanen terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
2. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
3. Biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expenses*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

2.3.2 Perbedaan Temporer

Menurut Waluyo (2016) perbedaan temporer yang dimaksud sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada aset atau liabilitas yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah (*future taxable amount*) atau berkurang (*future deductible amount*) pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi/dibayar. Perbedaan temporer ini berakibat harus diakuinya aset dan/atau liabilitas pajak tangguhan. Hal ini dapat terjadi pada kondisi:

1. Penghasilan atau beban yang harus diakui untuk menghitung laba fiskal atau laba komersial dalam periode berbeda;
2. *Goodwill* atau *goodwill* negatif yang terjadi saat konsolidasi;
3. Perbedaan nilai tercatat dengan *tax base* dari suatu aset atau liabilitas pada saat pengakuan awal;

4. Bagian dari biaya perolehan saat penggabungan usaha yang bermakna akuisisi dialokasikan ke aset atau liabilitas tertentu atas dasar nilai wajar, perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak.

Menurut Wirawan (2015) perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas di laporan keuangan yang disusun secara akuntansi dengan DPP-nya yang disebabkan karena penerapan metode pengakuan dan pengukuran penghasilan antara akuntansi dan perpajakan.

Dalam buku PSAK No. 46 mendefinisikan perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:

1. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau
2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

2.4 Penyajian Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibutuhkan dalam menggambarkan posisi dan kinerja suatu perusahaan yang akhirnya digunakan oleh berbagai kalangan. Misalnya bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berekepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. (Hery, 2015)

2.4.2 Pengertian Laporan Komersial

Dalam laporan keuangan komersial seseorang dapat memahami konsep bahwa setiap organisasi memerlukan informasi tentang keadaan yang sudah terjadi selama suatu periode tertentu.

Menurut Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati (2008) adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan menilai kondisi dan kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum yaitu standar akuntansi keuangan (SAK)

Sedangkan menurut Gunadi (2009) laporan keuangan komersial adalah Informasi yang disajikan oleh akuntansi keuangan kepada manajemen atau pihak lain

sehingga dapat diambil suatu penilaian dan kesimpulan atas segala sesuatu yang terjadi serta keputusan yang dilakukan selanjutnya.

2.4.3 Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Gunadi (2009) laporan keuangan yang memiliki kriteria tertentu dalam pengukuran dan pengakuan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2008) laporan keuangan yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan seperti menghitung pajak tangguhan masa yang akan datang dan pajak kini yang terhutang pada periode berjalan, dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mewajibkan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2.4.4 Tujuan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Kriteria pengukuran dan pengakuan terhadap laporan keuangan komersial adalah PSAK. Sedangkan dalam kriteria dan pengakuan laporan keuangan fiskal diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga tujuan dari kedua laporan tersebut memungkinkan adanya perbedaan atau tidak sejalan.

2.4.5 Fungsi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Selain dalam tujuan, fungsi laporan keuangan dan laporan fiskal pun berbeda. Dalam halnya laporan fiskal dapat menjadi bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak oleh administrasi, terutama aktifitas penyidikan dan pemeriksaan pajak.

Menurut Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati (2008) fungsi dari laporan keuangan komersial adalah untuk menggambarkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan tersebut, yang bermanfaat bagi pihak manajemen dan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan fungsi laporan fiskal menurut Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati (2008) adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

2.5 Hubungan PSAK No. 46 dengan Peraturan Perpajakan

Waluyo (2016) menjelaskan tentang hubungan PSAK No. 46 dengan ketentuan perpajakan bahwa laporan keuangan perusahaan dihasilkan tidak hanya untuk kepentingan manajemen, tetapi untuk kepentingan otoritas pajak yang dituangkan dalam bentuk SPT. Ketentuan dalam standar akuntansi keuangan tidak selamanya sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu PSAK No. 46 ini sebagai respon dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Laporan neraca dan laba rugi yang dihasilkan system akuntansi memiliki beberapa perbedaan aturan sehingga menimbulkan perbedaan sudut pandang

kedalam prinsip metode akuntansi. Seperti standar akuntansi keuangan menggunakan pendekatan aset-liabilitas (*asset-liability approach*) sedangkan Undang-Undang Perpajakan menggunakan pendekatan pendapatan-beban (*revenue-expense approach*). Dan pengakuan penyusutan seperti contoh penyusutan aset tetap secara akuntansi memiliki umur ekonomi 10 tahun, sedangkan menurut aturan pajak penyusutan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai jenisnya. Misalnya kelompok 1 dan umur manfaat 4 tahun.

2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk dijadikan bahan perbandingan dan sebagai bahan acuan penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya:

1. Sharen Elvin Juniver dan Sintje Rondonuwu

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2016 dengan judul “Analisis Akuntansi Perpajakan Terhadap Industri Asuransi Jiwa Raya (PERSERO) Manado” dengan tujuan mengetahui bagaimana penerapan akuntansi perpajakan terhadap industri asuransi pada Indonesia Asuransi Jiwa Raya (persero) Manado. Penelitian ini Indonesia hasil bahwa Indonesia Asuransi Jiwa Raya (persero) Manado telah menerapkan metode penangguhan pajak dalam menghitung PPh sebagaimana mengacu PSAK Indonesia. 46. Dalam hal penerapan Akuntansi Perpajakan di Indonesia Asuransi Jiwa Raya (persero) Manado sudah sesuai dengan UU Indonesia. 36 Tahun 2008 baik dalam penggunaan perhitungan, dan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2) dan PPN dan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan tarif progresif Pasal 17.

2. Dwi Arta Cahyono Putra

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2016 dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK Indonesia. 46 Terhadap Laporan Keuangan Indonesia MNC Sky Vision KPP Malang” dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah laporan keuangan Indonesia MNC Sky Vision telah sesuai dengan PSAK Indonesia. 46. Hasil penelitian ini Indonesia bahwa Indonesia MNC Sky Vision KPP Malang belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK Indonesia. 46. Setelah diterapkannya PSAK Indonesia. 46 ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu yang berasal dari perbedaan metode penyusutan aset tetap dan tarif yang digunakan antara perusahaan dengan peraturan perpajakan.

3. Debie Sukma

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2013 dengan judul “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada Indonesia Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru” dengan tujuan

untuk mengetahui apakah perusahaan telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan untuk mengetahui penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pada Indonesia Mitra Utama Sejahtera sudah menerapkan sesuai dengan Undang-Undang Indonesia. 36 Tahun 2018. Hasil penelitian ini Indonesia dalam perhitungan laba perusahaan, peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan Undang-Undang Perpajakan, peraturan perpajakan mengatur perhitungan laba fiskal untuk menentukan laba kena pajak, sedangkan prinsip akuntansi yang berlaku umum diterapkan untuk menentukan laba akuntansi (komersial).

4. Abdilla Rahmania Kusmala dan Hastoni

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Penerapan PSAK Indonesia. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi pada Tiga Perusahaan yang Terdaftar di BEI” dengan tujuan untuk mengetahui PSAK Indonesia. 46, mengetahui laporan laba rugi dan mengetahui bagaimana pengaruh penerapan PSAK Indonesia. 46 terhadap laporan laba rugi. Dalam laporan posisi keuangan Indonesia. Astra Internasional Tbk, Indonesia. Mustika Ratu Tbk, terdapat akun Aset Pajak Tanggahan yang timbul dari hasil beban pajak kini ditambahkan dengan beban pajak tanggahan. Pada bagian laporan posisi keuangan, terdapat akun aset pajak tanggahan yang timbul dari perbedaan temporer yang menyebabkan koreksi fiskal positif yang berdampak pada bertambahnya nilai laba sebelum pajak penghasilan, sedangkan akun liabilitas pajak tanggahan timbul dari adanya koreksi fiskal negatif yang berdampak pada berkurangnya nilai laba sebelum pajak penghasilan perusahaan. Pengaruh dan penerapan PSAK Indonesia. 46 adalah akan terjadinya perbedaan antara beban pajak penghasilan berupa nilai pajak penghasilan yang diakui oleh perusahaan dengan utang pajak penghasilan yang merupakan pajak penghasilan terutang yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, yang timbul akibat adanya perbedaan temporer.

5. Abdur Razaq

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2018 dengan judul “Analisis Pengaruh Revisi PSAK 46 (Pajak Penghasilan) terhadap Kesesuaian Penyajian Pelaporan Keuangan Indonesia Krakatau Steel (persero) Tbk Periode 2012-2016” dengan tujuan untuk mendeskripsikan penyajian pajak penghasilan PSAK 46 pada laporan keuangan Indonesia Krakatau Steel sebelum dan sesudah adanya revisi 2014. Indonesia Krakatau Steel sudah sesuai menyajikan PSAK 46, dilihat dari konsistennya Indonesia Krakatau Steel menyajikan aset dan liabilitas pajak tanggahan dan terdapat beban/manfaat pajak tanggahan pada penyajian laporan laba rugi komperhensif, dengan adanya revisi 2014 tidak mengubah adanya kesesuaian penyajian laporan keuangan.

6. Fitriani Saragih

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2016 dengan judul “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Karya Natal” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi keuangan perpajakan pada CV Karya Natal. Hasil penelitian ini Indonesia Akuntansi pajak penghasilan belum diterapkan dengan baik di perusahaan, dimana perhitungan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan adanya biaya yang digunakan untuk pengurangan laba *bruto*.

7. Anisya Oktari Prawita

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2013 dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Penghitungan PPh Terutang Pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 46 dan dampak dari penerapan PSAK No. 46. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh terutang pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

8. Windy Nawir Mansyur

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2012 dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan PT Prima Karya Manunggal” dengan tujuan untuk mengetahui apakah PT Prima Karya Manunggal telah menerapkan PSAK No. 46 dalam laporan keuangannya. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa PT Prima Karya Manunggal telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangannya, namun belum sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi atas pajak di masa yang akan 24sset24 berupa kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek, dengan menyarankan untuk melakukan jurnal penyesuaian.

9. Lucretia Fransisca Awusi

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2011 dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. Usaha Putri Poso” dengan tujuan untuk mengetahui prosedur dan perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan PSAK No. 46 serta dampak penerapannya terhadap penyajian laporan keuangan PT. Usaha Putri Poso. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Usaha Putri Poso belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No.46. Setelah diterapkannya PSAK No. 46 ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu yang berasal dari perbedaan metode penyusutan aktiva tetap dan 24sset24 yang digunakan antara perusahaan dengan peraturan perpajakan.

10. Taufik Hidayat

Penelitian ini dipublikasikan tahun 2016 dengan judul “Penerapan Pajak Penghasilan (PSAK 46) Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015 dengan tujuan untuk mengetahui penyajian Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46) telah diterapkan pada PT Indocement

Tunggal Prakarsa Tbk dan mengetahui pengungkapan PSAK 46 yang dilakukan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Yang Terdaftar di BEI telah sesuai dengan PSAK No. 46. Dinyatakan dengan disajikan pos 25 sset dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan, beban atau manfaat pajak tangguhan pada laporan laba rugi komperhensif perbedaan temporer dan perbedaan permanen pada CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), kebijakan akuntansi pajak penghasilan pada CALK serta adanya kerugian Fiskal yang dikompensasikan.

Dari penjabaran peneliti terdahulu di atas, peneliti menjelaskan secara ringkas penelitian terdahulu tersebut ke dalam Tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Publikasi
1	Sharen Elfin Juniver dan Sintje Rondonuwu	Analisis Akuntansi Perpajakan Terhadap Industri Asuransi pada PT Asuransi Jiwa Raya (PERSERO) Manado	Akuntansi Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Aset pajak kini • Aset pajak tangguhan • Kewajiban pajak kini • Kewajiban pajak tangguhan 	Sudah sesuai PSAK No. 46	ISSN 2303-1174, 2016
2	Dwi Artha Cahyono Putra	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT MNC Sky Vision KPP Malang	PSAK 46 dan Laporan Keuangan	Pajak Tangguhan	Belum sepenuhnya menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 46	Jurnal Riset Mahasiswa 2016 ISSN 2337-56xx
3	Debie Sukma	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru	Akuntansi Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Aset pajak kini • Aset pajak tangguhan • Kewajiban pajak kini • Kewajiban pajak tangguhan 	Dalam laporan laba rugi belum sesuai dengan pajak penghasilan	Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013 Repository.uin-suska.ac.id
4	Abdilla Rahmania Kusmala dan	Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap	Variabel Independen: PSAK Variabel	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia Pajak Tangguhan • Beban 	Terdapat akun Aset Pajak Tangguhan yang timbul dari	JIAKES Vol.2 No.1, 2014 pg. 31-46

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Publikasi
	Hastoni	Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan yang Terdaftar di BEI	Dependen : Laporan Laba Rugi	Pajak Tangguhan <ul style="list-style-type: none"> • Beban Pajak Penghasilan • Koreksi Fiskal 	perbedaan temporer yang ada. Pada bagian laporan laba rugi, PT. Astra Internasional Tbk, PT. Mustika Ratu Tbk, dan PT. Mayora Indah Tbk, adanya beban pajak penghasilan yang timbul dari hasil beban pajak kini ditambahkan dengan beban pajak tanggungan.	
5	Abdur Razzaq	Analisis Pengaruh Revisi PSAK 46 (Pajak Penghasilan) Terhadap Kesesuaian Penyajian Pelaporan Keuangan PT Krakatau Steel (persero)Tbk Periode 2012-2016	PSAK	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan • Perbedaan temporer kena pajak • Penghasilan kena pajak 	Sudah sesuai PSAK No. 46	Skripsi Tahun 2016, Universitas Pakuan
6	Fitriani Saragih	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Karya Natal	Akuntansi Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Aset pajak kini • Aset pajak tanggungan • Kewajiban pajak kini • Kewajiban pajak tanggungan 	Akuntansi pajak penghasilan belum diterapkan dengan baik diperusahaan	Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016 Jurnal.umsu.ac.id
7	Anisya Oktari Prawita	Analisis Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Penghitungan PPh Terutang Pada PT	PSAK 46	<ul style="list-style-type: none"> • Aset pajak tanggungan • Liabilitas pajak tanggungan • Pendapatan pajak tanggungan • Beban 	Telah sesuai dengan PSAK No 46	Skripsi Tahun 2013, Universitas Pakuan

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Publikasi
		Kimia Farma (Persero) Tbk		pajak tangguhan		
8	Windy Nawir Mansyur	Analisis Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan PT Prima Karya Manunggal	PSAK 46	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak tangguhan 	Telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan namun belum sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi atas pajak di masa yang akan datang	Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012 repository.unhas.ac.id
9.	Lucretia Fransisca Awusi	Analisis Penerapan Psak No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. Usaha Putri Poso	PSAK 46	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak tangguhan 	Belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No.46	Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2011 repository.unhas.ac.id
10	Taufik Hidayat	Penerapan Pajak Penghasilan (PSAK 46) Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015	PSAK 46	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan • Perbedaan temporer kena pajak • Penghasilan kena pajak • Penghasilan komersial 	Sudah sesuai PSAK No. 46	Skripsi Tahun 2016, Universitas Pakuan

2.7 Kerangka Pemikiran

Pada umumnya laporan keuangan entitas disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu disebut dengan laporan keuangan komersial. Namun perusahaan juga dituntut untuk melakukan sumbangsih terhadap negara melalui pajak, dalam pelaporan pajak, perusahaan tidak menggunakan laporan keuangan komersial, melainkan menggunakan laporan keuangan fiskal, karena pengakuan penghasilan menurut akuntansi dan pajak sangat berbeda, perbedaan inilah yang harus diatasi. Untuk itu dibuatlah PSAK No. 46 oleh IAI untuk menjawab semua perbedaan tersebut sehingga menghasilkan penghasilan yang dapat diterima oleh akuntansi dan perpajakan.

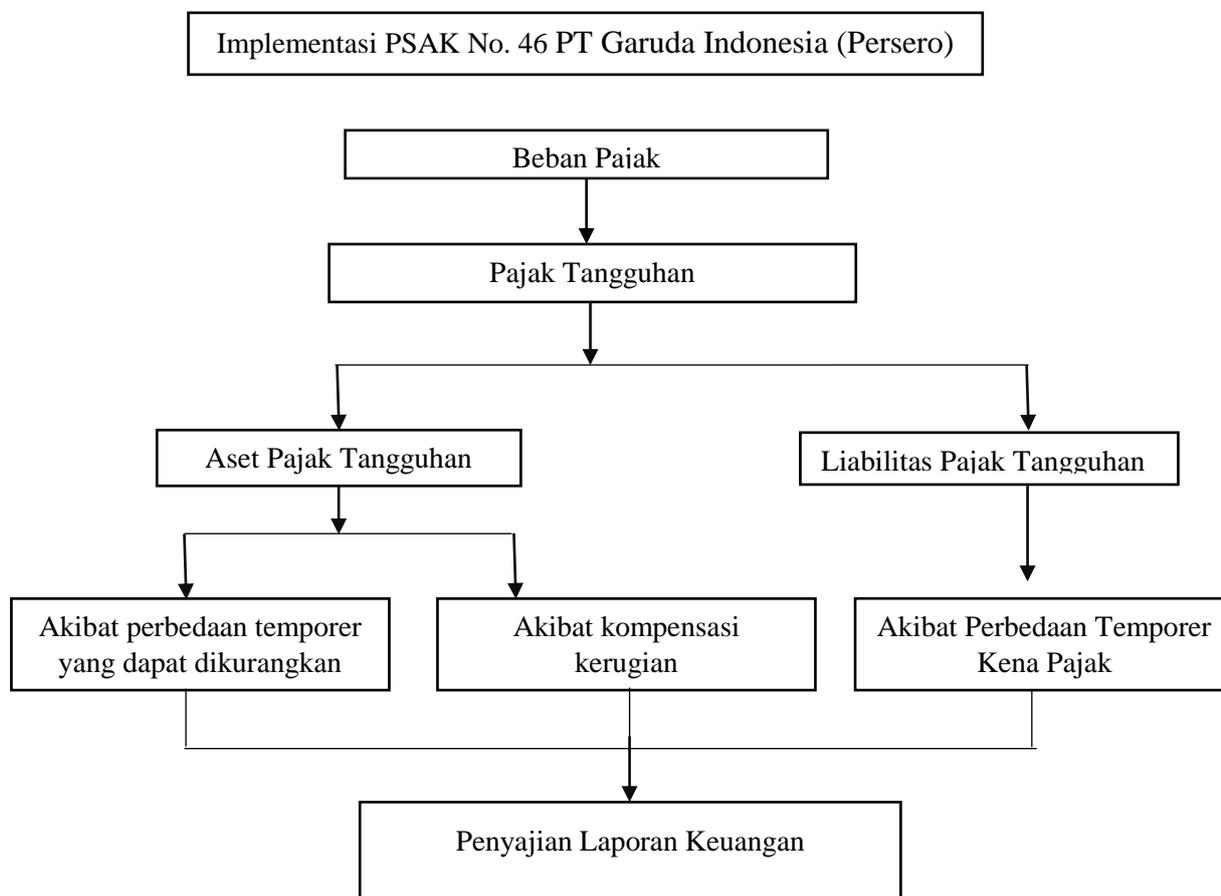
PSAK No. 46 membahas aspek-aspek mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. Namun dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada

pembahasan aspek penyajian dan pengungkapan dalam PSAK No. 46 pada penerapannya di laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terkait dengan pajak penghasilan. Apakah terdapat kesesuaian antara teori didalam PSAK No. 46 dengan fakta yang ditemukan didalam perusahaan dalam hal ini fakta-fakta yang diungkapkan berupa laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam PSAK No. 46 terdapat dua perbedaan, ada perbedaan temporer dan perbedaan permanen, fokus dalam penelitian ini adalah perbedaan temporer, karena perbedaan temporer dapat dipulihkan atau diselesaikan di masa yang akan datang sedangkan perbedaan permanen tidak bisa diganggu gugat karena pengakuan antara akuntansi komersial memiliki pengakuannya masing-masing. Untuk mengatasi perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan maka dibuatlah rekonsiliasi fiskal. Akibat dari rekonsiliasi ini memunculkan koreksi fiskal positif maupun negative dari perbedaan temporer tersebut terhadap laporan keuangan menurut akuntansi atas laba rugi komersial sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga dari koreksi fiskal ini dibuatlah laporan keuangan fiskal.

Dengan adanya PSAK No. 46 terdapat 2 (dua) beban pajak yang harus diakui dan dicatat dalam laporan keuangan yaitu pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini merupakan jumlah PPh terutang atau penghasilan kena pajak periode berjalan sedangkan pajak tangguhan merupakan hasil dari perbedaan pengakuan penghasilan dan beban dari saldo secara komersial dan fiskal yang hal tersebut menjadi perbedaan temporer. Jumlah pajak penghasilan harus diperhitungkan dalam laporan laba rugi periode berjalan karena akan berdampak pada pajak kini akan muncul, apakah dari pajak tangguhan akan menambah atau mengurangi pajak kini yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. (Razaaq, 2018).

Dari uraian tersebut, maka peneliti telah membuat kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif eksploratif *non statistic* yaitu penelitian yang dengan metode studi kasus mengenai kesesuaian antara fakta, pelaksanaan dan penerapan dengan teori, konsep, dan peraturan pada lokasi penelitian tertentu, yang dalam penulisan ini yaitu 30sset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

3.2 Objek Penelitian, Unit Analisis, Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah PSAK No. 46. Tentang akuntansi pajak penghasilan yang dilihat dari aspek penghasilan dan beban yang dituangkan dalam laporan keuangan konsolidasian pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis suatu penelitian dapat berupa organisasi, yaitu unit yang diteliti dalam analisis ini adalah sebuah perusahaan yang terbentuk dalam sebuah organisasi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga data dalam penelitian ini mengenai organisasi tersebut berasal dan berasal dari organisasi tersebut.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengunduh data laporan keuangan dan laporan tahunan pada periode 2016-2018 yang diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

3.3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder yang memang disediakan untuk publik mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka yang terdapat pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang bisa diperoleh melalui situs BEI yaitu www.idx.co.id.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyediaan data. Data yang dikumpulkan oleh peneliti data laporan keuangan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id atau dari situs resmi perusahaan tersebut. Berupa laporan keuangan tahunan perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang meliputi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komperhensif pada tahun 2016-2018.

3.4 Operasional Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu mengklarifikasi variabel penelitian.

Tabel 3.1
Operasional Variabel
Implementasi PSAK No. 46 Pada Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Periode 2016-2018

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Implementasi PSAK No. 46 Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018	Pajak Tangguhan	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi Pajak Tangguhan • Liabilitas Pajak Tangguhan • Penyajian Laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai 31sset pajak tangguhan • Nilai liabilitas pajak tangguhan • Laporan Posisi Keuangan 	Rasio

3.5 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode diatas, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyediaan data (media *online*/internet) dalam bentuk sudah jadi. Data yang diperoleh penulis adalah data yang mengenai pajak tangguhan (PSAK No. 46) pada tahun 2016-2018. Melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi www.idx.co.id dan website resmi perusahaan yang dilakukan untuk mengakses dan mengunduh data berupa laporan keuangan, penulis pengumpulan data dengan membaca buku akuntansi pajak, perpajakan, jurnal-jurnal terkait, dan sebagainya.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam mengimplementasi, peneliti menggunakan metode deskriptif non statistik, yaitu dengan menjelaskan informasi keuangan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan dalam laporan keuangan (bagaimana perusahaan menyajikan,

mengungkapkan, dan melaporkan sesuai dengan PSAK 46). Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis ini yaitu :

1. Menyajikan data laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan konsolidasian, laporan laba rugi komperhensif konsolidasi, laporan arus kas konsolidasian pada periode 2016-2018. Sehingga terlihat bagaimana gambaran atau kondisi PSAK Indonesia. 46.
2. Menganalisis laporan keuangan untuk tujuan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan tentang pajak penghasilan, yang terdiri dari :
 - a. Pos-pos yang berkaitan dengan pajak penghasilan yang berada pada laporan keuangan Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
 - b. Menyesuaikan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pajak penghasilan dalam laporan keuangan Indonesia Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - c. Mengidentifikasi apa saja yang menjadi beda tetap atau beda temporer.
 - d. Menyesuaikan penyajian, pengungkapan Pajak Tangguhan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau biasa dikenal dengan Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional pertama dan terbesar yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sejarah berdirinya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bermula sejak Presiden pertama Indonesia. Ir. Soekarno mengemukakan idenya di depan sejumlah pedagang besar di Aceh untuk membeli pesawat Dakota (DC 3) dalam rangka melanjutkan revolusi kemerdekaan melawan Belanda pada 16 Juni 1948. Menyikapi ide Presiden. Sebagian besar pedagang kemudian menyumbangkan dananya hingga terkumpul uang sebanyak 130.000 Strait Dollar dan 29 kg emas yang kemudian digunakan untuk membeli pesawat DC 3.

Maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tahun 1940-an dalam era pendudukan Belanda. Pada saat maskapai masih bernama Indonesian Airways sejak 26 Januari 1949 dengan pesawat pertamanya yang bernama Seulawah atau Gunung Emas. Pada awalnya Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). Dimana pemerintah Indonesia memiliki 51% sahamnya. Dalam 10 tahun pertama setelah pendiriannya perusahaan ini dikelola oleh KLM namun pihak KLM terpaksa harus menjual sebagai sahamnya pada tahun 1953 karena desakan nasionalis. Garuda Indonesia telah berhasil memiliki 7 pesawat beserta staf-staf profesional.

Perkembangan penyedia jasa penerbangan Garuda Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 1960-an. Garuda Indonesia mendatangkan tiga pesawat turbopro Lockheed L-188C Electra seiring dengan dibukanya rute penerbangan baru ke Hongkong. Beberapa tahun kemudin. Garuda kembali mendatangkan tiga pesawat baru jenis Convair 990A yang merupakan pesawat yang memiliki kecepatan tinggi dengan teknologi canggih. Dengan pesawat baru ini, Garuda kembali membuka rute penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam melewati Kolombo, Bombay, Roma dan Praha. Dalam perjalanannya maskapai kebanggaan bangsa perseroan juga tidak henti-hentinya mengasah keunggulan dan menyempurnakan diri, di antaranya dengan secara konsisten berusaha mencapai standar keamanan dan keselamatan terbaik. Atas usahanya tersebut perseroan menjadi satu-satunya maskapai sertifikasi IATA Operational Safety Audit (IOSA) Operator pada tahun 2008.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk didirikan berdasarkan akta No. 137 tanggal 31 Maret 1950 dari notaris Raden Kadiman. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. J.A.5/12/10 tanggal 31 1950 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Serikat No. 30 tanggal 12 Mei 1950 . tambahan No. 136.

4.2 Kondisi Implementasi PSAK NO 46

4.2.1 Implementasi PSAK NO 46 Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Perbedaan antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Perpajakan dikelompokkan menjadi dua yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer adalah perbedaan yang bersifat sementara dikarenakan adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara Peraturan Perpajakan dan PSAK. Sedangkan, perbedaan permanen adalah perbedaan yang terjadi karena Peraturan Perpajakan dalam perhitungan laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut PSAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan temporer mengakibatkan adanya pajak tangguhan. Berikut ini merupakan penerapan perbedaan temporer pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 4.1
Perbedaan Temporer dan Perbedaan Permanen
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018
(Disajikan dalam USD)

Akun	Tahun		
	2016	2017	2018
Perbedaan Temporer:			
Beban Penyisihan Piutang	70.288	(3.258.738)	(159.364)
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan	(487.384)	1.212.870	605.652
Beban Penyusutan	20.640.617	8.165.602	(52.120.748)
Penurunan Nilai Aset	(17.865.566)	(5.740.287)	-
Perbedaan Perlakuan Aset Pemeliharaan	(14.497.540)	(84.438)	61.242.372
Beban Imbalan Pasca Kerja	(59.302.798)	4.131.811	(2.028.344)
Sub Jumlah	(71.442.383)	4.426.820	7.539.568
Perbedaan Permanen:			
Sewa Pembiayaan	(16.426.306)	(16.578.715)	(16.791.897)
Penghasilan Yang dikenakan Pajak Final	(5.428.666)	(13.558.267)	(16.432.496)
Beban Yang Tidak Dapat Diperhitungkan Menurut Iskal	52.641.552	52.283.423	42.327.547
Sub Jumlah	30.786.580	22.146.441	9.103.154

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018. Diolah oleh penulis

Pada tabel 4.1 telah disajikan data mengenai Perbedaan Temporer dan Perbedaan Permanen pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018. Perbedaan Temporer PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan, Beban Penyusutan, Penurunan Nilai Aset. Perbedaan Perlakuan Aset Pemeliharaan dan Beban Imbalan Pasca Kerja.

Selama Periode 2016-2018. Beban penyisihan piutang mengalami koreksi fiskal positif pada tahun 2016 sebesar 70.288 dan mengalami koreksi fiskal negatif pada tahun 2017 dan 2018 sebesar (3.258.738) dan (159.364). Beban Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan mengalami koreksi fiskal negatif pada

tahun 2016 sebesar (487.384) dan mengalami koreksi positif pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 1.212.870 dan 605.652. Beban penyusutan mengalami koreksi positif pada tahun 2016 sebesar 20.640.617 dan 2017 sebesar 8.165.602 lalu mengalami koreksi negatif pada tahun 2018 sebesar (52.120.748). Penurunan Nilai Aset mengalami koreksi negatif pada tahun 2016 dan 2017 sebesar (17.865.566) dan (5.740.287). Perbedaan Perlakuan Aset Pemeliharaan mengalami koreksi negatif pada tahun 2016 dan 2017 sebesar (14.497.540) dan (84.438) dan mengalami koreksi positif pada tahun 2018 sebesar 61.242.372. Beban Imbalan Pasca Kerja mengalami koreksi 35sset3535e pada tahun 2016 dan 2018 sebesar (59.302.798) dan (2.028.344) dan mengalami koreksi positif pada tahun 2017 sebesar 4.131.811.

Dalam penerapan Akuntansi Perpajakan menurut PSAK No. 46. Perlakuan akuntansi dan pajak penghasilan menimbulkan adanya perbedaan temporer dan permanen. Perbedaan temporer inilah yang akan menyebabkan timbul adanya pajak tangguhan. Oleh karena itu, untuk pajak tangguhan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian lain harus konsisten dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi atau kejadian itu sendiri. (Hidayat. 2016)

Dalam pengakuan pajak tangguhan terdapat dampak dari adanya koreksi fiskal yang akan menghadirkan pos-pos yang terkait dalam pajak tangguhan tersebut melalui transaksi yang telah dilakukan suatu entitas. Pajak tangguhan terdiri atas aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap laporan keuangan. Penulis memperoleh pos-pos yang terkait dengan pajak tangguhan. Pos-pos tersebut dicantumkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Di dalam CALK terdapat perbedaan temporer yang nantinya akan diklasifikasikan ke dalam 35sset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Berikut disajikan aset pajak tangguhan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Tabel 4.2
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Pajak Tangguhan Tanggal 1 Jan 2016 dan 31 Des 2016

(Disajikan dalam USD)

	1 Januari 2016	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dicatat di penghasilan komperhensif	Penjabaran Laporan Keuangan	31 Desember 2016
Aset (Kewajiban) pajak tangguhan					
Perusahaan					
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	4.627.944	4.229			4.632.173
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	209.216	(134.087)			75.129
Penyusutan	(25.202.524)	21.927.258	(9.146.032)		(12.421.298)
Penurunan nilai aset	(996.189)	73.413			(922.776)
Penurunan investasi Merpati	1.147.028				1.147.028
Penyisihan piutang jangka panjang	8.429.344	484			8.429.828
Perbedaan perlakuan aset pemeliharaan	(45.955.264)	(12.782.974)			(58.738.238)
Provisi estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	24.022.604	(3.516.902)			20.505.702
Beban imbalan pasca kerja	22.688.450	(14.825.699)	(1.462.758)		6.399.993
Akumulasi rugi fiskal	80.788.101	23.162.377			103.950.478
Jumlah	69.758.709	13.908.099	(10.608.790)		73.058.018
Entitas anak					
PT Citilink Indonesia	17.540.876	2.082.384	(842.709)		18.780.551
PT Sabre Travel Network Indonesia	120.321	23.104	713		144.138
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia	12.466.185	(5.914.875)	2.659.773		9.211.083
PT Aero Wisata	2.249.540	90.481	592.246	(2.082)	2.930.185
PT Gapura Angkasa	2.854.997	394.986	989.228	130.778	4.369.989
Jumlah	35.231.919	(3.323.920)	3.399.251	128.696	35.435.946
Aset Pajak Tangguhan	104.990.625	10.584.179	(7.209.539)	128.696	108.493.964
Liabilitas pajak tangguhan					
Entitas anak					
PT Aero Systems Indonesia	(318.690)	(127.694)	(1.265)		(447.649)
PT Aero Wisata	(1.343.298)	394.298	418.857	8.375	(521.768)
PT Gapura Angkasa		(1.150.477)	113.379	(49.046)	(1.086.144)
Liabilitas pajak tangguha	(1.661.989)	(883.873)	530.971	(40.671)	(2.055.561)

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Periode 2016. Diolah oleh penulis

Pada tabel 4.2 telah disajikan data mengenai Pajak Tangguhan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016. Pajak Tangguhan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan. Aset pajak tangguhan bersih PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar 108.493.964 dan liabilitas pajak tangguhan bersih dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar (2.055.561).

Tabel 4.3
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Pajak Tangguhan Tanggal 1 Jan 2017 dan 31 Des 2017

(Disajikan dalam USD)

	1 Januari 2017	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dicatat di penghasilan komperhensif	Penjabaran Laporan Keuangan	31 Desember 2017
Aset (Kewajiban) pajak tangguhan					
Perusahaan					
Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang	4.632.173	(814.531)			3.817.642
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	75.129	303.218			378.347
Penyusutan	(12.421.298)	(4.448.647)	(2.855.309)		(19.725.254)
Penurunan nilai aset	(922.776)	(153.337)			(1.076.113)
Penurunan investasi Merpati	1.147.028				1.147.028
Penyisihan piutang jangka panjang	8.429.828	(154)			8.429.674
Aset pemeliharaan	(58.738.239)	3.966.982			(54.771.257)
Provisi estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	20.505.702	1.176.747			21.682.449
Beban imbalan pasca kerja	6.399.993	1.032.953	2.392.097		9.825.043
Akumulasi rugi fiskal	103.950.478	(39.807.038)			64.143.440
Jumlah	73058018	(38.743.807)	(463.212)		33.850.999
Entitas anak					
PT Citilink Indonesia	18.780.551	2.549.732	(1.421.421)		19.908.862
PT Sabre Travel Network Indonesia	144.138	(32.230)	14.036		125.944
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia	9.211.083	(1.020.061)	72.962		8.263.984
PT Aero Wisata	2.930.185	(77.539)	523.643	(13.644)	3.362.645
PT Gapura Angkasa	4.369.989	(1.254.909)	557.501	(56.914)	3.615.667
PT Aero Systems Indonesia			383.308		383.308
Jumlah	35.435.946	164.993	130.029	(70.558)	35.660.410
Aset Pajak Tangguhan	108.493.964	(38.578.814)	(333.183)	(70.558)	69.511.409
Liabilitas pajak tangguhan					

	1 Januari 2017	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dicatat di penghasilan komperhensif	Penjabaran Laporan Keuangan	31 Desember 2017
Entitas anak					
PT Aero Systems Indonesia	(447.649)	1.101.855	(371.514)	(282.692)	
PT Aero Wisata	(521.768)	65.328	(1.238.088)	9.183	(1.685.345)
PT Gapura Angkasa	(1.086.144)	1.086.144			
Liabilitas pajak tangguhan	(2.055.561)	2.253.327	(1.609.602)	(273.509)	(1.685.345)

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2017. Diolah oleh penulis

Pada tabel 4.3 telah disajikan data mengenai Pajak Tangguhan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2017. Pajak Tangguhan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan. Aset pajak tangguhan bersih PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar 69.511.409 dan liabilitas pajak tangguhan bersih dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar (1.685.345).

Tabel 4.4
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Pajak Tangguhan Tanggal 1 Jan 2018 dan 31 Des 2018

(Disajikan dalam USD)

	1 Januari 2018	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dicatat di penghasilan komperhensif	Penjabaran Laporan Keuangan	31 Desember 2018
Perusahaan					
Piutang Usaha	3.817.642	(38.653)			3.778.989
Persediaan	378.347	151.413			529.760
Aset tetap	(74.496.511)	(13.030.187)	(9.681.191)		(97.207.889)
Aset tidak 38sset38 lain-lain	8.500.589	(1.188)			8.499.401
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	21.682.449	15.310.593			36.993.042
Liabilitas imbalan kerja	9.825.043	(507.086)	(2.279.288)		7.038.669
Rugi pajak	64.143.440	52.903.047			117.046.487
Entitas anak					
PT Citilink Indonesia	19.908.862	7.892.845	(2.609.918)		25.191.789
PT Sabre Travel Network Indonesia	125.944	20.986	(5.653)		141.277
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia	8.263.984	(1.541.199)	(1.004.941)		5.717.844
PT Aero Wisata	1.677.300	944.080	298.546	(123.092)	2.796.834
PT Gapura Angkasa	3.615.667	(392.490)	(461.728)	(247.353)	2.514.096
PT Aero Systems Indonesia	383.308	72.436	(65.702)	(25.121)	364.921
Jumlah	67.826.064	61.784.597	(15.809.875)	(395.566)	113.405.220
Aset Pajak Tangguhan	69.511.409				114.193.884
Liabilitas pajak	(1.685.345)				(788.664)

	1 Januari 2018	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dicatat di penghasilan komperhensif	Penjabaran Laporan Keuangan	31 Desember 2018
tanggihan					

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2018. Diolah oleh penulis

Pada 39sset 4.4 telah disajikan data mengenai Pajak Tanggihan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Pajak Tanggihan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari Aset Pajak Tanggihan dan Liabilitas Pajak Tanggihan. Aset pajak tanggihan bersih PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar 114.193.884 dan liabilitas pajak tanggihan bersih dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (788.664).

4.2.2 Analisis Pos-pos Pajak Tanggihan terhadap Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi

Proses akuntansi yang digunakan oleh semua unit usaha (perusahaan) berakhir pada satu tujuan yaitu menyajikan suatu informasi keuangan untuk para pengambil keputusan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan sangat bergantung kepada kebijakan perusahaan. Dimana kebijakan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan maksud agar laporan keuangan yang tersaji dapat memenuhi syarat-syarat dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Laporan laba rugi dan neraca adalah dua laporan keuangan yang harus dihasilkan dari penyelenggaraan sistem akuntansi dan/atau pembukuan, baik yang diselenggarakan berdasar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal penutupan buku yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk satu periode tertentu. Selisih antara pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Laporan laba rugi komersial yang disusun secara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan dikoreksi fiskal atau disesuaikan dengan peraturan perpajakan sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. Dimana dalam penyusunan tersebut laporan laba rugi sangat penting peranannya bagi perusahaan karena merupakan alat untuk mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang didapat dalam suatu periode.

Setiap perusahaan baik perusahaan terbuka maupun CV pasti memiliki laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan. Berikut ini merupakan laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 4.5
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018
(Disajikan dalam USD)

Akun	Tahun		
	2016	2017	2018
Aset Lancar			
Pajak Dibayar Dimuka	44.732.744	27.144.415	24.213.858
Jumlah Aset Lancar	1.165.133.302	986.741.627	1.092.915.831
Aset Tidak Lancar			
Aset Pajak Tangguhan	108.493.964	69.511.409	114.193.884
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.572.436.088	2.776.550.466	3.074.700.469
Akun	Tahun		
	2016	2017	2018
Total Aset	3.737.569.390	3.763.292.093	4.167.616.300
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pajak	39.458.951	49.698.754	54.250.959
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.563.576.121	1.921.846.147	2.976.385.526
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Pajak Tangguhan	2.055.561	1.685.345	788.664
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.164.096.050	903.976.746	461.088.971
Total Liabilitas	2.727.672.171	2.825.822.893	3.437.474.497
Total Ekuitas	1.009.897.219	937.469.200	730.14.803
Total Liabilitas dan Ekuitas	3.737.569.390	3.763.292.093	4.167.616.300

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018. Diolah oleh penulis

Tabel 4.5 di atas menunjukkan ikhtisar dari laporan posisi keuangan konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada periode 2016-2018 mengenai perolehan aset. Liabilitas. Dan ekuitas. Total aset diperoleh dari jumlah aset lancar dan aset tidak lancar, total liabilitas diperoleh dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dan total ekuitas dijumlahkan dengan total liabilitas dan dibandingkan dengan total aset sehingga memunculkan hasil total yang seimbang sesuai dengan persamaan “Aset = Liabilitas + Ekuitas.”

Perolehan total aset PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk baik dari aset lancar maupun aset tidak lancar mengalami kenaikan dan penurunan selama periode tiga tahun terakhir. Perolehan total aset di tahun 2016 mencapai 3.737.569.390, tahun 2017 mencapai 3.763.292.093 dan di tahun 2018 mencapai 4.167.616.300. Hal ini diikuti oleh perolehan nilai liabilitas dan ekuitas yang juga mengalami kenaikan signifikan.

Di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ini PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menerapkan PSAK No. 46. Ini dilihat dari penyajian aset

pajak tangguhan pada aset tidak lancar dan liabilitas pajak tangguhan dari liabilitas jangka panjang. Penyajian ini dinilai tepat karena aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan telah disajikan terpisah dari beban pajak penghasilan yang ada di laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain.

Tabel 4.6
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain Konsolidasian
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018
(Disajikan dalam USD)

Akun	Tahun		
	2016	2017	2018
Pendapatan Usaha	3.863.921.565	4.177.325.781	4.373.177.070
Beban Usaha	3.795.927.643	4.237.773.332	4.579.259.674
Laba Usaha	99.103.939	(76.181.178)	(139.260.766)
Laba Sebelum Pajak	17.790.700	(158.180.637)	(221.052.484)
Beban Pajak:			
Kini	(17.960.427)	(18.883.554)	(15.421.713)
Tanggungan	9.700.306	(36.325.487)	61.784.597
Entitas Anak	(165.721)		(338.661)
Jumlah Beban Pajak	(8.425.842)	(55.209.041)	46.024.223
Laba Bersih Tahun Berjalan	9.364.858	(213.389.678)	(175.028.261)
Jumlah Laba Komperhensif Tahun Berjalan	59.174.034	(155.368.730)	(206.256.552)
Laba Bersih Tahun Berjalan Yang Dapat Didistribusikan	9.364.858	(213.389.678)	(175.028.261)
Jumlah Laba Komperhensif Tahun Berjalan Yang Dapat Didistribusikan	59.174.034	(155.368.730)	(206.256.552)

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018. diolah oleh penulis

Di dalam laporan laba rugi pada tabel 4.6 yang disajikan dalam dollar, terdapat akun Beban Pajak yang terdiri atas Pajak Kini dan Pajak Tanggungan. Pada tahun 2016 pajak kini sebesar (18.126.148) dan pajak tanggungan sebesar 9.700.306, pada tahun 2017 pajak kini sebesar (18.883.554) dan pajak tanggungan sebesar (36.325.487) sedangkan pada tahun 2018 pajak kini sebesar (15.421.713) dan pajak tanggungan sebesar 61.784.597. Sehingga menyebabkan jumlah labanya pun berbeda, pada tahun 2016 laba sebelum pajak penghasilan sebesar 17.790.700 dan setelah dikurangkan dengan beban pajak menjadi 9.364.858. pada tahun 2017 laba sebelum pajak penghasilan sebesar (158.180.637) dan setelah dikurangkan dengan beban pajak menjadi naik sebesar 0213.389.678). Sedangkan pada tahun 2018 laba sebelum pajak penghasilan sebesar (221.052.484) dan setelah dikurangkan dengan beban pajak sebesar (175.028.261)

4.3 Implementasi PSAK No. 46 terhadap Kebijakan Akuntansi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Untuk menganalisis adanya kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan penerapan PSAK No. 46, peneliti menyajikan tabel mengenai kebijakan akuntansi keuangan tentang pajak penghasilan yang diperoleh dari catatan atas laporan keuangan dan mencari kesesuaiannya dengan PSAK No. 46 yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Penyesuaian Kebijakan Akuntansi Pajak Penghasilan dengan PSAK No. 46
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018

No.	Kebijakan Akuntansi Pajak Penghasilan	Kesesuaian dengan PSAK No. 46
1	Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak.	Paragraf 5
2	Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan	Paragraf 47
3	Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.	Paragraf 51
4	Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.	Paragraf 56
5	Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis.	Paragraf 58(b)
6	Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksa secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikansi atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan dan dipulihkan.	Paragraf 71 (a), 71 (b), 72, dan 73

Sumber: Catatan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018, diolah oleh penulis

Berdasarkan penguraian kebijakan akuntansi dengan penyesuaian paragraf yang ada di PSAK No. 46 pada tabel 4.7 di atas, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menjelaskan tentang apa saja kebijakan-kebijakan yang telah perusahaan terapkan pada laporan keuangannya dan menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi tersebut berdasarkan sudah berdasarkan paragraf-paragraf yang ada di PSAK No. 46.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, peneliti juga menganalisis aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang berdasarkan PSAK NO. 46 dalam penerapannya pada laporan entitas konsolidasian yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Penerapan PSAK No. 46 pada Aspek Penyajian dan Pengungkapan
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018

Aspek Akuntansi	Berdasarkan PSAK No. 46	Penerapan di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Penyajian	Penyajian yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan pada laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aset atau liabilitas pajak kini dan disajikan dalam unsur <i>non current</i> dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan beban atau penghasilan pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan.	Dalam laporan posisi keuangan aset pajak tangguhan sudah disajikan terpisah dari aset pajak kini dan beban atau penghasilan pajak tangguhan juga telah disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan yang terutang dalam aset tidak lancar. Sedangkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain, pajak tangguhan telah disajikan terpisah dari pajak kini yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Pengungkapan	Pengungkapan yaitu berkaitan dengan standar informasai yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Seperti unsur-unsur perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan perubahan tarif dan sebagainya.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah mengungkapkan unsur-unsur perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan yang disajikan ditahun 2016-2018 diungkapkan secara rinci. Perusahaan menjelaskan pengungkapannya dalam catatan atas laporan keuangan.

Sumber: PSAK No. 46 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2018

4.3.1 Implementasi Akuntansi Perpajakan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Pajak tangguhan yang diklasifikasikan pada tabel 4.1 diatas. muncul karena adanya perbedaan antara kebijakan menurut akuntansi dan peraturan perpajakan. Untuk itu peneliti menganalisis perbedaan peraturan atau kebijakan antara akuntansi dan fiskal ke dalam analisis berikut :

1. Beban Penyisihan Piutang
 1. Standar Akuntansi

Menurut PSAK No.55 untuk instrument lindung nilai yang terbatas pada perubahan lain yang diperlukan untuk efek pengganti atas pihak lawan. Perubahan tersebut hanya terbatas pada lindung nilai yang konsisten dengan ketentuan yang akan diharapkan jika instrument lindung nilai awalnya dihapuskan dengan kliring pihak lawan. Perubahan ini termasuk perubahan dalam persyaratan agunan. hak untuk saling hapus saldo piutang dan saldo hutang dan biaya yang dikenakan. Dan dalam PSAK No. 55 pun lebih menyarankan agar piutang diukur dengan cara diamortisasi. Tetapi dalam praktek perusahaan melaporkan dengan nilai yang diharapkan diterima. Dalam akuntansi terdapat dua metode penghapusan yaitu metode langsung dan cadangan.

2. Peraturan Perpajakan

Menurut Undang-Undang PPh Pasal 6 ayat 1(h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak; dan
- 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah yang terutang;
- 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan
 1. Standar Akuntansi

Menurut PSAK 14. suatu penilaian baru dilakukan atas nilai realisasi neto pada setiap periode selanjutnya. Ketika keadaan yang semula

mengakibatkan penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan ternyata tidak ada lagi atau ketika terdapat bukti yang jelas terhadap peningkatan realisasi neto karena perubahan keadaan ekonomi. Maka jumlah penurunan nilai harus balik (yaitu pemulihan adalah terbatas untuk jumlah penurunan nilai awal) sehingga jumlah tercatat yang baru dari persediaan adalah yang terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto yang telah direvisi. Hal ini terjadi sebagai contoh ketika suatu jenis persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi neto karena harga jualnya telah turun masih dimiliki pada periode berikutnya dan harga jualnya telah meningkat.

2. Peraturan Perpajakan

Menurut UU PPh Pasal 10 ayat 6 pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu.

Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang di dapat pertama (*first in first out* atau FIFO).

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada laporan keuangan komersial yang disajikan dalam USD tahun 2016-2018 terdapat Biaya Penurunan Nilai Persediaan. Pada tahun 2016 terdapat biaya penurunan nilai persediaan sebesar (2.684.523) serta mengalami koreksi fiskal negatif sebesar (487.384) sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar (2.197.139), pada tahun 2017 terdapat biaya penurunan nilai persediaan sebesar (5.562.353) serta mengalami koreksi fiskal positif sebesar 1.212.870 sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar (6.775.223) dan 2018 mengalami biaya penurunan nilai persediaan sebesar (8.422.883) serta mengalami koreksi fiskal positif sebesar 605.652 sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar (9.02853)

3. Penyusutan

Perbedaan antara nilai tercatat bersih aset tetap dan properti investasi komersial dan fiskal terdapat pada penentuan metode penyusutannya. Metode penyusutan tersebut dibedakan sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi

Menurut PSAK 16 dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan dan rugi penurunan nilai atas aset tetap. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang

disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*) yaitu menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset masih dapat digunakan.
- b. Metode saldo menurun (*diminishing balance method*) yaitu menghasilkan pembebanan aset yang menurun selama umur manfaat aset.
- c. Metode jumlah unit (*sum of the unit method*) yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya, walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *judgemen*.

2. Peraturan Perpajakan

Menurut undang-undang PPh Pasal 11 penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Dalam peraturan perpajakan hanya menetapkan dua penyusutan yaitu garis lurus dan saldo menurun yang harus dilaksanakan secara konsisten. Aset (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat.

Tabel 4.9

Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan:			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12.50%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6.25%	12.50%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
Bangunan:			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Tabel 4.10
Koreksi Fiskal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Periode 2016-2018

(Disajikan dalam USD)

Tahun	Laporan Keuangan Komersial	Koreksi Fiskal	Laporan Keuangan Fiskal
2016	19.087.636	20.640.617	(1.552.981)
2017	18.706.451	8.165.602	10.540.849
2018	19.418.982	(52.120.748)	71.539.730

Sumber data: Diolah Penulis

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada laporan keuangan komersial yang disajikan dalam USD tahun 2016-2018 terdapat Penyusutan. Pada tahun 2016 mengalami penyusutan sebesar 19.087.636 serta mengalami koreksi fiskal positif sebesar 20.640.617 sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar (1.552.981). Pada tahun 2017 mengalami penyusutan sebesar 18.706.451 serta mengalami koreksi fiskal positif sebesar 8.165.602 sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar 10.540.849 dan 2018 mengalami penyusutan sebesar 19.418.982 serta mengalami koreksi fiskal negatif sebesar (52.120.748) sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar 71.539.730.

4. Penurunan Nilai Aset

1. Standar Akuntansi

Penurunan Nilai Aset ini termasuk didalam pembahasan perbedaan temporer. Dimana menurut PSAK 48 suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Paragraph 12-14 menjelaskan beberapa indikasi bahwa rugi penurunan nilai mungkin telah terjadi. Jika terdapat indikasi tersebut maka entitas disyaratkan untuk membuat estimasi formal jumlah terpulihkan. Kecuali seperti yang dideskripsikan dalam paragraph 10 pernyataan ini tidak mensyaratkan entitas untuk membuat estimasi formal jumlah terpulihkan jika tidak terdapat indikasi rugi penurunan nilai.

2. Peraturan Perpajakan

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Penghasilan (UU PPh). Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aset dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan kena pajak karena perkembangan harga.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada laporan keuangan komersial yang disajikan dalam USD tahun 2016-2018 terdapat Penurunan Nilai Aset. Pada tahun 2016 mengalami penurunan nilai aset sebesar (551.307) serta mengalami koreksi fiskal negatif sebesar (17.865.566) sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar 17.314.259

5. Perbedaan Perlakuan Aset Pemeliharaan

1. Standar Akuntansi

Menurut PSAK No. 16 biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya:

- a. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut;
- b. Biaya perolehannya dapat diukur secara handal. Sesuai dengan prinsip pengakuan. Entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Sebaliknya, biaya tersebut diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk suku cadangan kecil. Bagian tertentu aset tetap dapat mensyaratkan penggantian lainnya setelah digunakan selama sejumlah jam tertentu.

2. Peraturan Perpajakan

Menurut UU No. 36 tahun 2008 Pasal 19 tentang Penghasilan (UU PPh). Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan kena pajak. Pesawat dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada laporan keuangan komersial yang disajikan dalam USD tahun 2016-2018 terdapat Perbedaan Perlakuan Nilai Aset. Pada tahun 2016 mengalami perbedaan perlakuan aset pemeliharaan sebesar 393.308.458 serta mengalami koreksi fiskal negatif sebesar (14.497.540) sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar 407.805.998. Pada tahun 2017 mengalami perbedaan perlakuan aset pemeliharaan 429.361.211 serta mengalami koreksi fiskal negatif sebesar (84.438) sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar 429.445.649 dan 2018 mengalami penyusutan sebesar 529.365.958 serta mengalami koreksi fiskal positif sebesar 61.242.372 sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar 468.123.586

6. Beban Imbalan Pasca Kerja

1. Standar Akuntansi

Imbalan pasca kerja yang termasuk didalam pembahasan perbedaan temporer ini adalah beban imbalan pasca kerja. Di mana menurut PSAK No. 24 imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan suatu entitas dalam pertukaran atas jasa yang berikan oleh pekerja atau untuk pemutusan kontrak kerja. Berbeda dengan imbalan kerja, imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek) yang diterima pekerja setelah pekerja sudah tidak aktif bekerja atau menyelesaikan kontrak kerja. Contoh: pensiun, asuransi jiwa pasca kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pasca kerja. Jenis-jenis imbalan kerja yang tercantum dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Imbalan Kerja Jangka Pendek yaitu imbalan kerja yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Contoh: gaji, iuran jaminan social, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus dan imbalan nonmoneter (tidak berbentuk uang).
- 2) Imbalan Kerja Jangka Panjang yaitu imbalan kerja yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Contoh: cuti besar/cuti panjang, penghargaan masa kerja (*jubilee*) dan imbalan cacat permanen.

2. Peraturan Perpajakan

Menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 ayat 1(c) untuk menentukan besarnya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh dana pensiun atau badan lain yang menyebarkan uang pensiun dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Pemotongan atas pajak penghasilan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh dana pensiun.

Menurut UU RI No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Pasal 1 No. 8 disebutkan bahwa program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun seluruh iuran serta hasil pengembangan dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Selanjutnya atas penghasilan berupa manfaat pensiun tersebut dikenai pemotongan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 68 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16/PMK.03/2010.

4.4 Pembahasan

Tujuan peneliti dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK No. 46 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan pengungkapan berdasarkan PSAK No. 46 hal ini dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan yang telah menyajikan aset pajak tangguhan serta liabilitas pajak tangguhan. Perusahaan telah menyajikan perbedaan temporer dan perbedaan permanen sebagai dampak dari koreksi fiskal.

Tujuan penelitian yang kedua adalah apakah implementasi PSAK No. 46 telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menerima perbedaan temporer pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk karena terdapat perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Berikut ini disajikan tabel mengenai perbedaan temporer yang diatur berdasarkan PSAK dan Ketentuan Perpajakan:

Tabel 4.11

Perbedaan Temporer Berdasarkan PSAK dan Ketentuan Perpajakan

No	Klasifikasi	PSAK	Ketentuan Perpajakan
1	Beban Penyisihan Piutang	PSAK 55	UU PPh Pasal 6
2	Beban Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan	PSAK 14	UU PPh Pasal 10 ayat 6
3	Beban Penyusutan	PSAK 16	UU PPh Pasal 11
4	Penurunan Nilai Aset	PSAK 48	UU PPh 19 ayat (1)
5	Perbedaan Perlakuan Aset Pemeliharaan	PSAK 16	UU PPh 19 ayat (1)
6	Beban Imbalan Pasca Kerja	PSAK 24	UU PPh Pasal 21

Sumber data: diolah penulis.2019

Pos-pos ini terkait perbedaan temporer dikarenakan adanya perbedaan kebijakan antara akuntansi dan perpajakan. Oleh karena itu, perbedaan kebijakan antara akuntansi dan perpajakan ini kemudian dijabatani oleh suatu proses yaitu koreksi fiskal. Perbedaan temporer yang merupakan dampak koreksi fiskal pada suatu waktu akan mencapai keadaan yang sama atau dengan kata lain suatu waktu biaya tersebut akan terpulihkan pada periode selanjutnya. Maka dapat dilihat perbedaan temporer pada suatu entitas dan menimbulkan pajak tangguhan. Pajak tangguhan sebagai akibat dari perbedaan temporer dapat berupa beban dan manfaat pajak tangguhan yang disajikan pada laporan laba rugi komperhensif. Kemudian, pajak tangguhan dapat berupa pos aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan.

4.4.1 Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya

PSAK 46 adalah pernyataan standar akuntansi yang mengatur tentang pajak penghasilan perusahaan. PSAK No. 46 menggunakan basis akrual dalam

perhitungannya terhadap beban, aset dan liabilitas pajak tangguhan sehingga dalam akuntansi pun harus dihitung dampak pajak yang harus dibayarkan di masa depan. Hidayat (2016) menyimpulkan bahwa laporan keuangan dinyatakan dan disajikannya pos aset dan liabilitas pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan, beban atau Manfaat Pajak Tangguhan pada laporan laba rugi komperhensif, perbedaan temporer dan perbedaan permanen pada CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), kebijakan akuntansi pajak penghasilan pada CALK serta adanya kerugian Fiskal yang dikompensasikannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018 mengenai data yang diperoleh kemudian membandingkan dengan teori yang ada. Maka kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implementasi PSAK No. 46 pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai berdasarkan PSAK No. 46, karena perusahaan telah optimal dalam hal pengungkapan. Hal ini dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan yang telah menyajikan aset pajak tangguhan serta liabilitas pajak tangguhan, perusahaan juga telah menyajikan perbedaan temporer dan perbedaan permanen.
2. Pada tahun 2016-2018 telah menerapkan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan PSAK No. 46 dapat dilihat dari perbedaan temporer yang menyebabkan perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan sudah sesuai.

5.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pemahaman mengenai penyajian laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya tentang akuntansi perpajakan di PSAK No. 46. Karena setiap perusahaan diharuskan membayar pajak berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan tersebut atas kegiatan bisnis yang dikelola perusahaan. Apabila perusahaan belum sesuai dan belum menerapkan PSAK No. 46, maka perusahaan tersebut harus menyajikan dan menghitung kembali akun-akun sebagai pajak penghasilan yang akan memunculkan akun-akun pajak tangguhan dalam laporan keuangan yang berguna bagi perusahaan tersebut. Harapan peneliti adalah laporan keuangan yang disajikan harus lebih relevan dan mengikuti perkembangan terkini dari PSAK, karena setiap tahunnya pasti ada amandemen atau revisi dalam peraturannya yang menyesuaikan dengan kondisi di masa yang akan datang., sehingga informasi yang diperlukan dapat diandalkan dan berguna dalam kewajaran laporan keuangan yang akan diaudit pada periode berjalan. Adapun saran yang dapat disampaikan dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Bagi Perusahaan

Dengan telah sesuainya penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan konsolidasian dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dibuat

dengan memadai, perusahaan harus mempertahankan kesesuaian tersebut untuk pelaporan di periode mendatang, dan lebih detail lagi dalam mengungkapkan informasi-informasi dan memahami perkembangan waktu untuk periode selanjutnya atas akun-akun yang menjadi pengungkapan dari PSAK No. 46 berdasarkan amandemen yang sesuai dengan tanggal efektif.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi Penelitian Selanjutnya adalah agar dalam melakukan penelitian menggunakan perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dimana hanya dapat dilakukan dengan data primer, yaitu data langsung yang diperoleh dari perusahaan sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya akan terlihat bagaimana perhitungan-perhitungan mengenai pos-pos pajak tangguhan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Awusi, Lucrea. F. (2011). *Analisis Penerapan Psak N. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. Usaha Putri Poso*. Skripsi. Universitas Hasanduin.
- Elvin, S. dan Rondonuwu, S. (2016). *Analisis Akuntansi Perpajakan Terhadap Industri Asuransi Jiwa Raya (PERSERO) Manado*. Jurnal. E- ISSN 2303-1174.
- Fauziyah, Z. (2019). *Analisis Penerapan PSAK No.46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Agung Podomoro Land Tbk (Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017)*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Harnanto (2016). *Akuntansi Perpajakan, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Herry. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service.
- Hidayat, T. (2016). *Penerapan Pajak Penghasilan (PSAK 46) Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14 (Persediaan)*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (Aset Tetap)*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (Imbalan Kerja)*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 48 (Penurunan Nilai Aset)*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran)*
- Ilyas, W. dan Priantara. D. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi revisi 2018*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset
- Martini, D. (2016). *Akuntansi Pajak Penghasilan*, Depok: Universitas Indonesia (Slide OCW Universitas Indonesia).
- Mohammad Zain. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawir, Windy. M. (2012). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan PT Prima Karya Manunggal*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Prawita, Anisya O. (2013). *Analisis Penerapan PSAK NO 46 Terhadap Perhitungan PPh Terutang Pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Putra, Dwi A. C. (2016). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan PT MNC SKY Vision KPP Malang*. Jurnal, [online] Volume xx, Tersedia di: ejournal.unikama.ac.id [diakses pada 10 januari 2020]
- Rahmania, Abdilla. K. dan Hastoni (2014). *Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi pada Tiga Perusahaan yang Terdaftar di BEI*. JIAKES Vol.2 No.1, 2014 pg. 31-46.

Razzaq, A. (2018). *Analisis Pengaruh Revisi PSAK 46 (Pajak Penghasilan) Terhadap Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Periode 2012-2016*. Skripsi. Universitas Pakuan.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi ke sepuluh. Jakarta: Salemba Empat

Saragih, F. (2016). *Pajak Penghasilan Badan Pada Analisis Akuntansi CV Karya Natal*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sukma, D. (2013). *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada PT Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. (2008). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Tarlich, Mely O. *Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Pada PT MSC Tahun 2017*. Skripsi. Universitas Pakuan.

Walusyo, (2016). *Akuntansi Pajak*. Edisi ke enam. Jakarta: Salemba Empat.

Website:

www.annualreport.id

www.idx.co.id

www.liputan6.com

www.pajak.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riza Permatasari

Alamat : Kp.Ciminyak Rt 001/001 Desa Ciminyak, Kec. Muncang,
Kab.Lebak, Provinsi Banten. 42364

Tempat dan tanggal Lahir : Lebak, 03 Desember 1996 Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SD Negeri 1 Ciminyak
- SMP : Pondok Pesantren La Tansa
- SMA : Pondok Pesantren La Tansa
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2020

Peneliti,

(Riza Permatasari)

LAMPIRAN

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 AND 2015

	Catatan/ Notes	31 Desember 2016/ December 31, 2016 USD	31 Desember 2015/ December 31, 2015 USD	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5,45	578.702.739	519.972.655	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade accounts receivables
Pihak berelasi	6,45	3.716.431	2.318.588	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar USD 7.279.906 pada 31 Desember 2016 dan USD 5.487.220 pada 31 Desember 2015		187.579.134	119.209.053	Third parties - net of allowance for impairment loss of USD 7,279,906 at December 31, 2016 and USD 5,487,220 at December 31, 2015
Piutang lain-lain	7	21.172.730	17.581.553	Other receivables
Persediaan - bersih	8	108.954.457	91.631.231	Inventories - net
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	9	220.275.067	177.104.409	Advances and prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	10	44.732.744	80.030.516	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar		<u>1.165.133.302</u>	<u>1.007.848.005</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Dana perawatan pesawat dan uang jaminan	11,48,49	1.241.870.703	1.012.753.651	Maintenance reserve fund and security deposits
Uang muka pembelian pesawat	12	169.738.910	204.469.384	Advances for purchase of aircraft
Investasi pada entitas asosiasi	13	427.479	399.772	Investment in associates
Aset pajak tangguhan	10	108.493.964	104.990.625	Deferred tax assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar USD 625,778,389 pada 31 Desember 2016 dan USD 591,322,702 pada 31 Desember 2015	14	926.666.977	867.089.209	Property and equipment - net of accumulated depreciation of USD 625,778,389 at December 31, 2016 and USD 591,322,702 at December 31, 2015
Properti investasi	15	57.772.474	55.390.166	Investment properties
Aset takberwujud - bersih	16	4.992.892	4.648.523	Intangible assets - net
Beban tangguhan - bersih		1.307.310	2.193.585	Deferred charges - net
Aset lain-lain - bersih	17,45	61.165.379	50.228.066	Other assets - net
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>2.572.436.088</u>	<u>2.302.162.981</u>	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		<u>3.737.569.390</u>	<u>3.310.010.986</u>	TOTAL ASSETS

Lihat catatan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 - Continued

	Catatan/ Notes	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015		
		USD	USD		
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES	
Utang bank dan lembaga keuangan	18,45	698.011.118	361.254.270	Loan from banks and financial institution	
Utang usaha				Trade accounts payable	
Pihak-pihak berelasi	19,45	91.412.955	44.963.436	Related parties	
Pihak ketiga		129.019.003	104.392.331	Third parties	
Utang lain-lain	20	35.583.709	49.901.950	Other payables	
Utang pajak	10	39.458.951	80.997.046	Taxes payable	
Beban akrual	21	197.983.396	181.042.507	Accrued expenses	
Pendapatan diterima dimuka	22	229.846.173	176.531.019	Unearned revenues	
Uang muka diterima		30.932.877	24.549.496	Advances received	
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long term liabilities	
Pinjaman jangka panjang	23,45	61.696.994	103.936.071	Long-term loans	
Liabilitas sewa pembiayaan	24	22.311.219	15.125.233	Lease liabilities	
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	25	27.319.726	53.155.762	Estimated liability for aircraft return and maintenance cost	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.563.576.121	1.195.849.121	Total Current Liabilities	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON CURRENT LIABILITIES	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Non current maturities of long-term liabilities:	
Pinjaman jangka panjang	23,45	132.418.213	133.022.468	Long-term loans	
Liabilitas sewa pembiayaan	24	138.588.227	106.055.960	Lease liabilities	
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	25	86.550.585	69.448.854	Estimated liability for aircraft return and maintenance cost	
Utang obligasi	26	641.041.165	635.947.442	Bonds payable	
Liabilitas pajak tangguhan	10	2.055.561	1.661.989	Deferred tax liabilities	
Liabilitas imbalan kerja	28	116.009.808	177.519.224	Employment benefits obligation	
Liabilitas tidak lancar lainnya	27	47.432.491	39.782.743	Other non current liabilities	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.164.096.050	1.163.438.680	Total Non Current Liabilities	
EKUITAS				EQUITY	
Modal saham - nilai nominal Rp 459 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B				Capital stock - Rp 459 par value per share for Series A Dwiwarna share and Series B shares	
Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 29.999.999,999 saham Seri B				Authorized - 1 of Series A Dwiwarna share and 29,999,999,999 Series B shares	
Modal ditempatkan dan disetor - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 25.868.926.632 saham Seri B pada 31 Desember 2016 dan 2015	29	1.309.433.569	1.309.433.569	Issued and paid-up capital - 1 Series A Dwiwarna shares and 25,868,926,632 Series B share at December 31, 2016 and 2015	
Tambahan modal disetor	30	(33.948.489)	(33.948.489)	Additional paid-in capital	
Opsi saham	32	2.770.970	2.770.970	Stock option	
Saldo laba				Retained earnings	
Defisit sebesar USD 1.385.459.977 pada tanggal 1 Januari 2012 telah dieliminasi dalam rangka kuasi-reorganisasi (Catatan 54)				Deficit amounting USD 1,385,459,977 as of January 1, 2012 was eliminated in connection with quasi reorganization (Notes 54)	
- Dicadangkan	33	6.081.861	6.081.861	- Appropriated	
- Belum dicadangkan		(221.069.730)	(220.046.387)	- Unappropriated	
Pendapatan komprehensif lainnya	14,31	(70.462.233)	(130.770.768)	Other comprehensive income	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik		992.805.948	933.520.756	Equity attributable to owners of the company	
Keperentingan non pengendali	34	17.091.271	17.202.429	Non controlling interest	
Jumlah Ekuitas		1.009.897.219	950.723.185	Total Equity	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3.737.569.390	3.310.010.986	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	

Lihat catatan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2017 AND 2016

	Catatan/ Notes	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
		USD	USD	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5,45	306.918.945	578.702.739	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade accounts receivables
Pihak berelasi	6,45	7.738.669	3.716.431	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar USD 7.826.683 pada 31 Desember 2017 dan USD 7.279.906 pada 31 Desember 2016		221.511.419	187.579.134	Third parties - net of allowance for impairment loss of USD 7,826,683 at December 31, 2017 and USD 7,279,906 at December 31, 2016
Piutang lain-lain	7	42.993.404	21.172.730	Other receivables
Persediaan - bersih	8	131.155.717	108.954.457	Inventories - net
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	9	249.279.058	220.275.067	Advances and prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	10	27.144.415	44.732.744	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar		986.741.627	1.165.133.302	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Dana perawatan pesawat dan uang jaminan	11,48,49	1.506.626.547	1.241.870.703	Maintenance reserve fund and security deposits
Uang muka pembelian pesawat	12	172.590.300	169.738.910	Advances for purchase of aircraft
Investasi pada entitas asosiasi	13	511.344	427.479	Investment in associates
Aset pajak tangguhan	10	69.511.409	108.493.964	Deferred tax assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar USD 680.664.849 pada 31 Desember 2017 dan USD 625.778.389 pada 31 Desember 2016	14	900.657.607	926.666.977	Property and equipment - net of accumulated depreciation of USD 680,664,849 at December 31, 2017 and USD 625,778,389 at December 31, 2016
Properti investasi	15	67.433.865	57.772.474	Investment properties
Aset takberwujud - bersih	16	3.424.645	4.992.892	Intangible assets - net
Beban tangguhan - bersih		1.210.992	1.307.310	Deferred charges - net
Aset lain-lain - bersih	17,45	54.583.757	61.165.379	Other assets - net
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.776.550.466	2.572.436.088	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		3.763.292.093	3.737.569.390	TOTAL ASSETS

Lihat catatan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2017 AND 2016 - Continu

	Catatan/ Notes	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
		USD	USD	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank	18,45	868.378.784	698.011.118	Loan from banks
Utang usaha				Trade accounts payable
Pihak-pihak berelasi	19,45	95.136.627	91.412.955	Related parties
Pihak ketiga		128.886.122	129.019.003	Third parties
Utang lain-lain	20	43.412.813	35.583.709	Other payables
Utang pajak	10	49.698.754	39.458.951	Taxes payable
Beban akrual	21	202.761.501	197.983.396	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka	22	253.439.521	229.846.173	Unearned revenues
Uang muka diterima		36.963.563	30.932.877	Advances received
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long term liabilities
Pinjaman jangka panjang	23,45	64.001.397	61.696.994	Long-term loans
Liabilitas sewa pembiayaan	24	13.801.586	22.311.219	Lease liabilities
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	25	18.045.272	27.319.726	Estimated liability for aircraft return and maintenance cost
Utang obligasi	26	147.320.207	-	Bonds payable
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>1.921.846.147</u>	<u>1.563.576.121</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Non current maturities of long-term liabilities:
Pinjaman jangka panjang	23,45	60.355.645	132.418.213	Long-term loans
Liabilitas sewa pembiayaan	24	66.893.867	138.588.227	Lease liabilities
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	25	101.346.802	86.550.585	Estimated liability for aircraft return and maintenance cost
Utang obligasi	26	494.707.567	641.041.165	Bonds payable
Liabilitas pajak tangguhan	10	1.685.345	2.055.561	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	28	133.234.790	116.009.808	Employment benefits obligation
Liabilitas tidak lancar lainnya	27	45.752.730	47.432.491	Other non current liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>903.976.746</u>	<u>1.164.096.050</u>	Total Non Current Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 459 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B				Capital stock - Rp 459 par value per share for Series A Dwiwarna share and Series B shares
Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 29.999.999.999 saham Seri B				Authorized - 1 of Series A Dwiwarna share and 29,999,999,999 Series B shares
Modal ditempatkan dan disetor - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 25.886.576.253 saham Seri B pada 31 Desember 2017 dan 25.868.926.632 saham Seri B pada 31 Desember 2016	29	1.310.326.950	1.309.433.569	Issued and paid-up capital - 1 Series A Dwiwarna shares and 25,886,576,253 Series B shares at December 31, 2017 and 25,868,926,632 Series B shares at December 31, 2016
Tambahan modal disetor	30	23.526.520	(33.948.489)	Additional paid-in capital
Opsi saham	32	-	2.770.970	Stock option
Saldo laba				Retained earnings
Defisit sebesar USD 1.385.459.977 pada tanggal 1 Januari 2012 telah dieliminasi dalam rangka kuasi-reorganisasi (Catatan 53)				Deficit amounting USD 1,385,459,977 as of January 1, 2012 was eliminated in connection with quasi reorganization (Note 53)
- Dicadangkan	33	6.081.861	6.081.861	- Appropriated
- Belum dicadangkan		(449.484.287)	(221.069.730)	- Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	14,31	4.330.661	(70.462.233)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik		894.781.705	992.805.948	Equity attributable to owners of the company
Keperluan non pengendali	34	42.687.495	17.091.271	Non controlling interest
Jumlah Ekuitas		<u>937.469.200</u>	<u>1.009.897.219</u>	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>3.763.292.093</u>	<u>3.737.569.390</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements are in the Indonesian language

Ekshibit A

Exhibit A

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2018

	Catatan/ Notes	31/12/2018	31/12/2017	
		USD	USD	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2f, 2g, 4	251.188.737	305.717.850	Cash and cash equivalents
Kas dibatasi penggunaannya	2f, 2g, 4	569.923	1.201.095	Restricted cash
Piutang usaha	2f, 5			Trade receivables
Pihak berelasi		62.439.198	7.738.669	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar USD 7.792.676 (31 Desember 2017: USD 7.826.683)		351.661.479	221.511.419	Third parties - net of allowance for impairment loss of USD 7,792,676 (31 December 2017: USD 7,826,683)
Piutang lain-lain	2f, 2t, 6	280.808.848	42.993.404	Other receivables
Persediaan	2h, 7	176.457.029	131.155.717	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	2i, 8	209.635.668	249.279.058	Advances and prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	2z, 9	24.213.858	27.144.415	Prepaid taxes
Total aset lancar		1.356.974.740	986.741.627	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Dana cadangan pemeliharaan dan uang jaminan	2f, 10	1.683.138.397	1.506.626.547	Maintenance reserve fund and security deposits
Uang muka pembelian pesawat	2f, 11	172.007.581	172.590.300	Advances for purchase of aircraft
Investasi pada entitas asosiasi	2j, 12	673.004	511.344	Investment in associates
Properti investasi	2k, 13	81.155.552	67.433.865	Investment properties
Aset pajak tangguhan	2z, 9	54.178.361	69.511.409	Deferred tax assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar USD 757.552.862 (31 Desember 2017: USD 680.664.849)	2l, 14	944.002.399	900.657.607	Fixed assets - net of accumulated depreciation of USD 757,552,862 (31 December 2017: USD 680,664,849)
Aset takberwujud	2p, 15	1.476.348	3.424.645	Intangible assets
Beban tangguhan	2q	1.130.829	1.210.992	Deferred charges
Aset tidak lancar lain-lain	2f, 16	76.922.475	54.583.757	Other non-current assets
Total aset tidak lancar		3.014.684.946	2.776.550.466	Total non-current assets
TOTAL ASET		4.371.659.686	3.763.292.093	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying notes to consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as whole.

The original consolidated financial statements are in the Indonesian language

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2018

	Catatan/ Notes	31/12/2018	31/12/2017	
		USD	USD	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka pendek	2s, 17	1.047.132.765	868.378.784	Short-term loans
Utang usaha	2s, 18			Trade payables
Pihak berelasi		247.998.777	95.136.627	Related parties
Pihak ketiga		154.328.620	128.886.122	Third parties
Liabilitas anjak piutang	2s, 19	109.780.236	-	Factoring liabilities
Utang lain-lain	2s, 2t, 20	120.549.414	43.412.813	Other payables
Utang pajak	2x, 9	78.247.776	49.698.754	Taxes payable
Beban akrual	2s, 21	233.169.596	202.761.501	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka	2x, 2y, 22	298.966.684	253.439.521	Unearned revenue
Uang muka diterima	2x	65.078.336	36.963.563	Advances received
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Pinjaman jangka panjang	2s, 23	25.536.141	64.001.397	Long-term loans
Liabilitas sewa pembiayaan	2n, 2s, 24	14.261.210	13.801.586	Finance lease liabilities
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	2v, 25	56.067.107	18.045.272	Estimated liability for aircraft return and maintenance cost
Utang obligasi	2s, 26	-	147.320.207	Bonds payable
Total liabilitas jangka pendek		2.451.116.662	1.921.846.147	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities - net of current maturities:
Pinjaman jangka panjang	2s, 23	77.536.546	60.355.645	Long-term loans
Liabilitas sewa pembiayaan	2n, 2s, 24	52.588.888	66.893.867	Finance lease liabilities
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	2v, 25	124.895.098	101.346.802	Estimated liability for aircraft return and maintenance cost
Utang obligasi	2s, 26	496.845.180	494.707.567	Bonds payable
Pendapatan diterima dimuka	2x, 2y, 22	95.556.331	-	Unearned revenue
Liabilitas pajak tangguhan	2x, 9	788.664	1.685.345	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbanan kerja	2u, 27	120.506.890	133.234.790	Liabilities for employee benefits
Liabilitas tidak lancar lainnya	2n, 28	41.637.055	45.752.730	Other non-current liabilities
Total liabilitas jangka panjang		1.010.354.652	903.976.746	Total non-current liabilities
Total liabilitas		3.461.471.314	2.825.822.893	Total liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 459 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B				Share capital - Rp 459 par value per share for Series A Dwiwarna share and Series B shares
Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 29.999.999.999 saham Seri B				Authorized - 1 of Series A Dwiwarna share and 29,999,999,999 Series B shares
Modal ditempatkan dan disetor - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 25.886.576.253 saham Seri B	2w, 30	1.310.326.950	1.310.326.950	Issued and paid-up capital - 1 Series A Dwiwarna share and 25,886,576,253 Series B shares
Tambahan modal disetor	2w, 31	23.526.520	23.526.520	Additional paid-in capital
Saldo laba (defisit)				Retained earnings (deficit)
Defisit sebesar USD 1.385.459.977 pada tanggal 1 Januari 2012 telah dieliminasi dalam rangka kuasi-reorganisasi (Catatan 52)				Deficit amounting USD 1,385,459,977 as of 1 January 2012 was eliminated in connection with quasi reorganization (Note 52)
- Dicadangkan	2c, 32	6.081.861	6.081.861	- Appropriated
- Betum dicadangkan		(415.858.167)	(449.484.287)	- Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	2d, 2l, 2t, 33	(60.691.932)	4.330.661	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		863.385.232	894.781.705	Equity attributable to owners of the parent
Keperluan non-pengendali	2b, 34	46.803.140	42.687.495	Non-controlling interest
Total ekuitas		910.188.372	937.469.200	Total equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		4.371.659.686	3.763.292.093	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying notes to consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as whole.

Jakarta, 28 Maret 2019/ 28 March 2019

Direktur Utama
Garuda Indonesia
IG. N. Askhara Dihadiputra
1900294

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
Director of Finance & Risk Management
Garuda Indonesia
1900603

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015			PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015
	2016	Catatan/ Notes	2015
	USD		USD
PENDAPATAN USAHA			OPERATING REVENUES
Penerbangan berjadwal	3.279.806.762	35	3.208.469.733
Penerbangan tidak berjadwal	192.145.848	35	261.899.138
Lainnya	391.968.955	35	344.620.874
Jumlah Pendapatan Usaha	3.863.921.565		3.814.989.745
BEBAN USAHA			OPERATING EXPENSES
Operasional penerbangan	2.187.316.263	36	2.190.607.282
Pemeliharaan dan perbaikan	393.308.458	37	376.500.961
Bandara	334.047.207	38	301.880.822
Tiket, penjualan dan promosi	310.187.732	39	309.608.281
Pelayanan penumpang	286.289.766	40	270.750.084
Administrasi dan umum	226.797.925	41	224.907.111
Operasional hotel	28.180.038		29.698.564
Operasional transportasi	17.848.699		17.528.744
Operasional jaringan	11.951.555		10.303.636
Jumlah Beban Usaha	3.795.927.643		3.731.785.485
BEBAN (PENDAPATAN) USAHA LAINNYA			OTHER OPERATING (INCOME) CHARGES
Kerugian (keuntungan) selisih kurs	19.170.712		(15.213.543)
Lain-lain	(50.280.729)	42	(70.327.638)
Bersih	(31.110.017)		(85.541.181)
LABA USAHA	99.103.939		168.745.441
Bagian rugi bersih asosiasi	(215.172)		(98.259)
Pendapatan keuangan	7.180.597		6.597.482
Beban keuangan	(88.278.664)	43	(68.584.517)
LABA SEBELUM PAJAK	17.790.700		106.660.147
BEBAN PAJAK	(8.425.842)	10	(28.685.986)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	9.364.858		77.974.161
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
POS-POS YANG TIDAK DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			ITEM THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED SUBSEQUENTLY TO PROFIT OR LOSS
Peningkatan revaluasi aset tetap - bersih	48.017.873		26.847.140
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	(14.236.271)		(3.428.663)
Pajak penghasilan terkait item yang tidak direklasifikasi	(6.678.568)		(1.079.565)
Subjumlah	27.103.034		22.338.912
POS-POS YANG MUNGKIN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA DAN RUGI			ITEM THAT MAY BE RECLASSIFIED SUBSEQUENTLY TO PROFIT OR LOSS
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas transaksi lindung nilai arus kas	13.154.916		(10.708.281)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	9.551.226		(18.349.198)
Subjumlah	22.706.142		(29.057.479)
Jumlah penghasilan komprehensif lain	49.809.176		(6.718.567)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	59.174.034		71.255.594
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	8.069.365		76.480.236
Kepentingan non pengendali	1.295.493	34	1.493.925
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	9.364.858		77.974.161
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	59.285.192		70.022.788
Kepentingan non pengendali	(111.158)	34	1.232.806
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	59.174.034		71.255.594
LABA PER SAHAM DASAR - diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0,00031	44	0,00296
			EARNINGS PER SHARE - BASIC attributable to owner of the parent company

Lihat catatan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016	Catatan/ Notes			PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
	2017 USD		2016 USD	
PENDAPATAN USAHA				OPERATING REVENUES
Penerbangan berjadwal	3.401.980.804	35	3.279.806.762	Scheduled airline services
Penerbangan tidak berjadwal	301.498.970	35	192.145.848	Non-scheduled airline services
Lainnya	473.846.007	35	391.968.955	Others
Jumlah Pendapatan Usaha	<u>4.177.325.781</u>		<u>3.863.921.565</u>	Total Operating Revenues
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Operasional penerbangan	2.478.025.975	36	2.187.316.263	Flight operations
Pemeliharaan dan perbaikan	429.361.211	37	393.308.458	Maintenance and overhaul
Bandera	382.651.073	38	334.047.207	User charges and station
Tiket, penjualan dan promosi	323.723.174	39	310.187.732	Ticketing, sales and promotion
Pelayanan penumpang	298.973.443	40	286.289.766	Passenger services
Administrasi dan umum	265.808.770	41	226.797.925	General and administrative
Operasional hotel	26.125.254		28.180.038	Hotel operation
Operasional transportasi	21.028.192		17.848.699	Transportation operations
Operasional jaringan	12.076.240		11.951.555	Network operation
Jumlah Beban Usaha	<u>4.237.773.332</u>		<u>3.795.927.643</u>	Total Operating Expenses
BEBAN (PENDAPATAN) USAHA LAINNYA				OTHER OPERATING (INCOME) CHARGES
Beban pengampunan pajak	50.307.992		-	Tax amnesty expenses
Kerugian (keuntungan) selisih kurs	(14.777.069)		19.170.712	Loss (gain) on foreign exchange
Lain-lain	(19.797.296)	42	(50.280.729)	Others
Bersih	<u>15.733.627</u>		<u>(31.110.017)</u>	Net
LABA (RUGI) USAHA	<u>(76.181.178)</u>		<u>99.103.939</u>	PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS
Bagian laba (rugi) bersih asosiasi	192.617		(215.172)	Equity in net gain (loss) of associates
Pendapatan keuangan	6.196.164		7.180.597	Finance income
Beban keuangan	<u>(88.388.240)</u>	43	<u>(88.278.664)</u>	Finance cost
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	<u>(158.180.637)</u>		<u>17.790.700</u>	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
Pajak kini	(18.883.554)	10	(18.126.148)	Current tax
Pajak tangguhan	<u>(36.325.487)</u>	10	<u>9.700.306</u>	Deferred tax
BEBAN PAJAK	<u>(55.209.041)</u>		<u>(8.425.842)</u>	TAX EXPENSES
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	<u>(213.389.678)</u>		<u>9.364.858</u>	NET PROFIT (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
POS-POS YANG TIDAK DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI				ITEMS THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED SUBSEQUENTLY TO PROFIT OR LOSS
Peningkatan revaluasi aset tetap - bersih	50.984.648		48.017.873	Gain on revaluation of property and equipment - net
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	(16.816.713)		(14.236.271)	Remeasurement of defined benefit obligation
Pajak penghasilan terkait item yang tidak direklasifikasi	<u>(1.942.785)</u>		<u>(6.678.568)</u>	Income tax relating to items that will not be reclassified
Subjumlah	<u>32.225.150</u>		<u>27.103.034</u>	Subtotal
POS-POS YANG MUNGKIN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI				ITEMS THAT MAY BE RECLASSIFIED SUBSEQUENTLY TO PROFIT OR LOSS
Keuntungan belum direalisasi atas transaksi lindung nilai	28.245.899		13.154.916	Unrealized gain on hedge transaction
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	<u>(2.450.101)</u>		<u>9.551.226</u>	Exchange differences on translating foreign operations
Subjumlah	<u>25.795.798</u>		<u>22.706.142</u>	Subtotal
Jumlah penghasilan komprehensif lain	<u>58.020.948</u>		<u>49.809.176</u>	Total other comprehensive income
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	<u>(155.368.730)</u>		<u>59.174.034</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE CURRENT YEAR
LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	(216.582.416)		8.069.365	Owners of the Company
Kepentingan non pengendali	<u>3.192.738</u>	34	<u>1.295.493</u>	Non controlling interest
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	<u>(213.389.678)</u>		<u>9.364.858</u>	NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	(153.621.663)		59.285.192	Owners of the Company
Kepentingan non pengendali	<u>(1.747.067)</u>	34	<u>(111.158)</u>	Non controlling interest
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>(155.368.730)</u>		<u>59.174.034</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR - diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<u>(0,00837)</u>	44	<u>0,00031</u>	EARNINGS (LOSS) PER SHARE - BASIC attributable to owner of the parent company

Lihat catatan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements are in the Indonesian language

Ekshibit B

Exhibit B

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018

	Catatan/ Notes	2018	2017	
		USD	USD	
PENDAPATAN USAHA				OPERATING REVENUES
Penerbangan berjadwal	2x, 35	3.538.378.852	3.401.980.804	Scheduled airline services
Penerbangan tidak berjadwal	2x, 35	266.866.623	301.498.970	Non-scheduled airline services
Lainnya	2x, 35	567.931.595	473.846.007	Others
Total		4.373.177.070	4.177.325.781	Total
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban operasional penerbangan	2x, 36	2.735.868.147	2.478.025.975	Flight operations expenses
Beban pemeliharaan dan perbaikan	2x, 37	529.365.958	429.361.211	Maintenance and repairs expenses
Beban bandara	2x, 38	404.718.544	382.651.073	User charges and station expenses
Beban tiket, penjualan dan promosi	2x, 39	324.376.515	323.723.174	Ticketing, sales and promotion expenses
Beban pelayanan penumpang	2x, 40	291.948.721	298.973.443	Passenger services expenses
Beban administrasi dan umum	2x, 41	221.343.549	265.808.770	General and administrative expenses
Beban operasional hotel	2x	31.474.431	26.125.754	Hotel operation expenses
Beban operasional transportasi	2x	28.001.571	21.028.192	Transportation operations expenses
Beban operasional jaringan	2x	12.162.238	12.076.240	Network operation expenses
Total		4.579.259.674	4.237.773.332	Total
PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME (CHARGES)
Beban pengampunan pajak		-	(50.307.992)	Tax amnesty expenses
Keuntungan selisih kurs		28.073.775	14.777.069	Gain on foreign exchange
Pendapatan lain-lain - bersih	2x, 42	278.810.155	19.797.296	Other income - net
Bersih		306.883.930	(15.733.627)	Net
LABA (RUGI) USAHA		100.801.326	(76.181.178)	PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS
Bagian laba bersih asosiasi		204.241	192.617	Equity in profit of associates
Pendapatan keuangan	2x	3.695.161	6.196.164	Finance Income
Beban keuangan	2m, 43	(85.691.120)	(88.388.240)	Finance cost
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		19.009.608	(158.180.637)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	2x, 9	(13.991.300)	(55.209.041)	TAX EXPENSES
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		5.018.308	(213.389.678)	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
Surplus revaluasi aset tetap	2l, 33	71.219.126	50.984.648	Revaluation surplus on fixed assets
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas liabilitas imbalan kerja	2u, 27	12.388.580	(16.816.713)	Actuarial gain (loss) on liabilities for employee benefits
Beban pajak tangguhan terkait	2z, 9	(15.809.875)	(1.942.785)	Related deferred tax expenses
Sub-total		67.797.831	32.225.150	Sub-total
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will be reclassified to profit or loss:
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas transaksi lindung nilai	2t, 29	(89.577.811)	28.245.899	Unrealized gain (loss) on hedge transaction
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2d	(9.448.311)	(2.450.101)	Exchange differences on translating foreign operations
Sub-total		(99.026.122)	25.795.798	Sub-total
Total penghasilan (kerugian) komprehensif lain		(31.228.291)	58.020.948	Total other comprehensive income (loss)
TOTAL KERUGIAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(26.209.983)	(155.368.730)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO
Pemilik entitas induk		809.846	(216.582.416)	Owners of the parent
Keperluan non-pengendali	2b, 34	4.208.462	3.192.738	Non-controlling interest
Total		5.018.308	(213.389.678)	Total
TOTAL KERUGIAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS ATTRIBUTABLE TO
Pemilik entitas induk		(31.396.473)	(153.621.663)	Owners of the parent
Keperluan non-pengendali	2b, 34	5.186.490	(1.747.067)	Non-controlling interest
Total		(26.209.983)	(155.368.730)	Total
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	2aa, 44	0,00003	(0,00837)	BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying notes to consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as whole.

Jakarta, 28 Maret 2019/28 March 2019

Direktur Utama/
CEO

PT Garuda Indonesia
DIREKTUR UTAMA
1900295

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Director of Finance & Risk Management

PT Garuda Indonesia
AG Firdausy
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
1900350

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 - Continued

d. <u>Utang Pajak</u>	31 Desember 2016/ <u>December 31, 2016</u>	31 Desember 2015/ <u>December 31, 2015</u>	d. <u>Taxes Payable</u>
	USD	USD	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	1.808.503	1.240.893	Article 21
Pasal 22	6.194	7.629	Article 22
Pasal 4(2)	22.692	37.828	Article 4 (2)
Pasal 23	1.046.152	1.396.818	Article 23
Pasal 26	818.698	2.059.448	Article 26
Pajak pertambahan nilai	8.470.493	8.297.493	Value Added Taxes
Pajak lain-lain	12.880.397	42.607.717	Other taxes
Sub jumlah	<u>25.053.129</u>	<u>55.647.826</u>	Sub total
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	2.381.905	2.265.072	Article 21
Pasal 23	598.400	673.841	Article 23
Pasal 25	664.131	281.004	Article 25
Pasal 4 (2)	180.187	178.561	Article 4 (2)
Pasal 26	405.670	294.928	Article 26
Pasal 29	6.084.618	7.518.098	Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	1.823.454	747.532	Value Added Taxes
Pajak Pembangunan 1	1.245.689	1.191.672	Local Government Taxes 1
Pajak lain-lain	1.021.768	12.198.512	Other taxes
Sub jumlah	<u>14.405.822</u>	<u>25.349.220</u>	Sub total
Jumlah	<u>39.458.951</u>	<u>80.997.046</u>	Total
e. <u>Manfaat (Beban) Pajak</u>			e. <u>Tax Benefit (Expense)</u>
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
	USD	USD	
<u>Pajak kini</u>			<u>Current tax</u>
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	(17.960.427)	(16.146.760)	Subsidiaries
Jumlah pajak kini	<u>(17.960.427)</u>	<u>(16.146.760)</u>	Total current tax
<u>Pajak tangguhan</u>			<u>Deferred tax</u>
Perusahaan	13.908.099	(8.543.661)	The Company
Entitas anak	(4.207.793)	(3.662.023)	Subsidiaries
Jumlah pajak tangguhan	<u>9.700.306</u>	<u>(12.205.684)</u>	Total deferred tax
Beban pajak entitas anak sehubungan dengan SKP dan SPT pemetulan	(165.721)	(333.542)	Tax expense of subsidiaries in connection with SKP and SPT correction
Jumlah	<u>(8.425.842)</u>	<u>(28.685.986)</u>	Total

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 - Continued

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lainnya dengan laba (rugi) fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

Current Tax

A reconciliation between income (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal loss) of the Company is as follows:

	2016 USD	2015 USD	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	17.790.700	106.660.147	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Eliminasi dan penyesuaian	(81.732.171)	(72.091.606)	Elimination and adjustment
Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan	<u>(63.941.471)</u>	<u>34.568.541</u>	Profit (loss) before tax of the Company
<u>Perbedaan temporer:</u>			<u>Temporary differences:</u>
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	70.288	(480.211)	Allowance for impairment losses of accounts receivable
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	(487.384)	(8.430)	Allowance for decline in value of inventories
Beban penyusutan	20.640.617	22.088.715	Depreciation expense
Penurunan nilai aset	(17.865.566)	(5.222.126)	Impairment of assets
Perbedaan perlakuan aset pemeliharaan	(14.497.540)	(11.461.331)	Maintenance assets
Beban imbalan pasca kerja	(59.302.798)	(10.017.805)	Post employment benefits
Sub jumlah	<u>(71.442.383)</u>	<u>(5.101.188)</u>	Sub total
<u>Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:</u>			<u>Nondeductible expenses/ Non taxable income:</u>
Sewa pembiayaan	(16.426.306)	(15.652.057)	Lease liabilities
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(5.428.666)	(34.078.715)	Income subjected to final tax
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	52.641.552	51.578.823	Expenses that are not deductible for tax purposes
Sub jumlah	<u>30.786.580</u>	<u>1.848.051</u>	Sub total
Laba (rugi) fiskal sebelum kompensasi kerugian fiskal	(104.597.274)	31.315.404	Taxable income (fiscal loss) before fiscal loss carryforward
Kompensasi rugi fiskal			Fiscal loss carryforward
Rugi fiskal 2013 - setelah penyesuaian SPT atas laba fiskal tahun 2015	(19.994)	(37.720.783)	Fiscal loss of 2013 - adjusted after SPT taxable income for the year 2015
Rugi fiskal 2014 - setelah penyesuaian SKP diterima tahun 2016	(311.184.644)	(316.747.017)	Fiscal loss 2014 - adjusted after received SKP in 2016
Akumulasi rugi fiskal	<u>(415.801.912)</u>	<u>(323.152.396)</u>	Accumulated fiscal loss
Laba fiskal yang dilaporkan di SPT tahun 2015 sebesar USD 35.483.965 berbeda dengan yang tercantum dalam laporan keuangan sehingga berdampak terhadap pengakuan pemanfaatan rugi fiskal 2013 menjadi USD 19.994.			Taxable income reported on SPT 2015 amounted to USD 35,483,965 is different from amount stated on financial statement and has impact to recognition of 2013 fiscal loss utilization amounted to USD 19,994.

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 - Continued

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

Details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2016 USD	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss for the period USD	Dicatat di penghasilan komprehensif lain/ Recognized in other comprehensive income USD	Penjabaran Laporan Keuangan/ Translation Adjustment USD	31 Desember/ December 31, 2016 USD	
Aset (Kewajiban) pajak tangguhan						Deferred tax assets (liabilities)
<u>Perusahaan</u>						<u>The Company</u>
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	4.627.944	4.229	-	-	4.632.173	Allowance for impairment loss of accounts receivables
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	209.216	(134.087)	-	-	75.129	Allowance for decline in value of inventories
Penyusutan	(25.202.524)	21.927.258	(9.146.032)	-	(12.421.298)	Depreciation
Penurunan nilai aset	(996.189)	73.413	-	-	(922.776)	Impairment of asset
Penurunan investasi Merpati	1.147.028	-	-	-	1.147.028	Impairment of investment in Merpati
Penyisihan piutang jangka panjang	8.429.344	484	-	-	8.429.828	Provision for long term receivable
Perbedaan perlakuan aset pemeliharaan	(45.955.264)	(12.782.974)	-	-	(58.738.238)	Maintenance assets
Provisi estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	24.022.604	(3.516.902)	-	-	20.505.702	Estimated liabilities for aircraft return and maintenance cost
Beban imbalan pasca kerja	22.688.450	(14.825.699)	(1.462.758)	-	6.399.993	Post employment benefits
Akumulasi Rugi Fiskal	80.788.101	23.162.377	-	-	103.950.478	Tax loss carry forward
Jumlah	69.758.709	13.908.099	(10.608.790)		73.058.018	Total
<u>Entitas anak</u>						<u>Subsidiaries</u>
PT Citilink Indonesia	17.540.876	2.082.384	(842.709)	-	18.780.551	PT Citilink Indonesia
PT Sabre Travel Network Indonesia	120.321	23.104	713	-	144.138	PT Sabre Travel Network Indonesia
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia	12.466.185	(5.914.875)	2.659.773	-	9.211.083	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia
PT Aero Wisata dan entitas anak	2.249.540	90.481	592.246	(2.082)	2.930.185	PT Aero Wisata and its subsidiaries
PT Gapura Angkasa	2.854.997	394.986	989.228	130.778	4.369.989	PT Gapura Angkasa
Jumlah	35.231.919	(3.323.920)	3.399.251	128.696	35.435.946	Total
Aset pajak tangguhan - bersih	104.990.625	10.584.179	(7.209.539)	128.696	108.493.964	Deferred tax asset - net
Liabilitas pajak tangguhan - bersih						Deferred tax liabilities - net
<u>Entitas anak</u>						<u>Subsidiaries</u>
PT Aero Systems Indonesia	(318.690)	(127.694)	(1.265)	-	(447.649)	PT Aero Systems Indonesia
PT Aero Wisata dan entitas anak	(1.343.298)	394.298	418.857	8.375	(521.768)	PT Aero Wisata and its subsidiaries
PT Gapura Angkasa	-	(1.150.477)	113.379	(49.046)	(1.086.144)	PT Gapura Angkasa
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(1.661.988)	(883.873)	530.971	(40.671)	(2.055.561)	Deferred tax liabilities - net

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2017 AND 2016
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
- Continued

d. Manfaat (Beban) Pajak

	2017	2016
	USD	USD
<u>Pajak kini</u>		
Perusahaan	-	-
Entitas anak	(18.804.354)	(17.960.427)
Jumlah pajak kini	<u>(18.804.354)</u>	<u>(17.960.427)</u>
<u>Pajak tangguhan</u>		
Perusahaan	(38.743.807)	13.908.099
Entitas anak	2.418.320	(4.207.793)
Jumlah pajak tangguhan	<u>(36.325.487)</u>	<u>9.700.306</u>
Beban pajak entitas anak sehubungan dengan SKP dan SPT pembetulan	(79.200)	(165.721)
Jumlah	<u>(55.209.041)</u>	<u>(8.425.842)</u>

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dengan laba pajak (fiskal) Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
	USD	USD
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(158.180.637)	17.790.700
Eliminasi dan penyesuaian	(20.491.273)	(81.732.171)
Rugi sebelum pajak Perusahaan	<u>(178.671.910)</u>	<u>(63.941.471)</u>
<u>Perbedaan temporer:</u>		
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	(3.258.738)	70.288
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	1.212.870	(487.384)
Beban penyusutan	8.165.602	20.640.617
Penurunan nilai aset	(5.740.287)	(17.865.566)
Perbedaan perlakuan aset pemeliharaan	(84.438)	(14.497.540)
Beban imbalan pasca kerja	4.131.811	(59.302.798)
Sub jumlah	<u>4.426.820</u>	<u>(71.442.383)</u>
<u>Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:</u>		
Sewa pembiayaan	(16.578.715)	(16.426.306)
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(13.558.267)	(5.428.666)
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	<u>52.283.423</u>	<u>52.641.552</u>
Sub jumlah	<u>22.146.441</u>	<u>30.786.580</u>
Rugi fiskal sebelum kompensasi kerugian fiskal	(152.098.649)	(104.597.274)
Kompensasi rugi fiskal		
Rugi fiskal 2013 - setelah penyesuaian SPT atas laba fiskal tahun 2015	-	(19.994)
Rugi fiskal 2014 - setelah penyesuaian SKP tahun 2016	-	(311.184.644)
Rugi fiskal 2016 - SPT Tahun 2016	(104.475.108)	-
Akumulasi rugi fiskal	<u>(256.573.757)</u>	<u>(415.801.912)</u>

d. Tax Benefit (Expense)

Current tax

The Company
Subsidiaries
Total current tax

Deferred tax

The Company
Subsidiaries
Total deferred tax

Tax expense of subsidiaries
in connection with
SKP and SPT correction
Total

Current Tax

A reconciliation between profit (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal loss) of the Company is as follows:

Profit (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Elimination and adjustment
Loss before tax of the Company

Temporary differences:

Allowance for impairment losses of accounts receivable
Allowance for decline in value of inventories
Depreciation expense
Impairment of assets

Maintenance assets
Post employment benefits
Sub total

Non deductible expenses/

Non taxable income:
Lease liabilities
Income subjected to final tax
Expenses that are not deductible for tax purposes
Sub total

Fiscal loss before
fiscal loss carryforward
Fiscal loss carryforward

Fiscal loss of 2013 - adjusted after SPT taxable income for the year 2015

Fiscal loss 2014 - adjusted after SKP in 2016
Fiscal loss 2016 - SPT in 2016
Accumulated fiscal loss

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2017 AND 2016
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
- Continued

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

Details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to	Dicatat di penghasilan komprehensif lain/ Recognized in other comprehensive income	Penjabaran Laporan Keuangan/ Translation Adjustment		
1 Januari/ January 1, 2017	for the period	income	USD	31 Desember/ December 31, 2017	
USD	USD	USD	USD	USD	
Aset (Kewajiban) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
<u>Perusahaan</u>					<u>The Company</u>
Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang	4.632.173	(814.531)	-	-	3.817.642
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	75.129	303.218	-	-	378.347
Penyusutan	(12.421.298)	(4.448.647)	(2.855.309)	-	(19.725.254)
Penurunan nilai aset	(922.776)	(153.337)	-	-	(1.076.113)
Penurunan investasi Merpati	1.147.028	-	-	-	1.147.028
Penyisihan piutang jangka panjang	8.429.828	(154)	-	-	8.429.674
Aset Pemeliharaan	(58.738.239)	3.966.982	-	-	(54.771.257)
Provisi estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	20.505.702	1.176.747	-	-	21.682.449
Beban imbalan pasca kerja	6.399.993	1.032.953	2.392.097	-	9.825.043
Akumulasi Rugi Fiskal	103.950.478	(39.807.038)	-	-	64.143.440
Jumlah	73.058.018	(38.743.807)	(463.212)	-	33.850.999
<u>Entitas anak</u>					<u>Subsidiaries</u>
PT Citilink Indonesia	18.780.551	2.549.732	(1.421.421)	-	19.908.862
PT Sabre Travel Network Indonesia	144.138	(32.230)	14.036	-	125.944
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	9.211.083	(1.020.061)	72.962	-	8.263.984
PT Aero Wisata dan entitas anak	2.930.185	(77.539)	523.643	(13.644)	3.362.645
PT Garuda Angkasa	4.369.989	(1.254.909)	557.501	(56.914)	3.615.667
PT Aero Systems Indonesia	-	-	383.308	-	383.308
Jumlah	35.435.946	164.993	130.029	(70.558)	35.660.410
Aset pajak tangguhan - bersih	108.493.964	(38.578.814)	(333.183)	(70.558)	69.511.409
Liabilitas pajak tangguhan - bersih					Deferred tax liabilities - net
<u>Entitas anak</u>					<u>Subsidiaries</u>
PT Aero Systems Indonesia	(447.649)	1.101.855	(371.514)	(282.692)	-
PT Aero Wisata dan entitas anak	(521.768)	65.328	(1.238.088)	9.183	(1.685.345)
PT Garuda Angkasa	(1.086.144)	1.086.144	-	-	-
Jumlah	(2.055.561)	2.253.327	(1.609.602)	(273.509)	(1.685.345)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(2.055.561)	2.253.327	(1.609.602)	(273.509)	(1.685.345)

The original consolidated financial statements are in the Indonesian language

Ekshibit E/43

Exhibit E/43

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018

PERPAJAKAN (Lanjutan)

9. TAXATION (Continued)

c. Penghasilan (beban) pajak

c. Tax income (expense)

	2018	2017	
	USD	USD	
Pajak kini			Current tax
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	(15.421.713)	(18.804.354)	Subsidiaries
Total pajak kini	(15.421.713)	(18.804.354)	Total current tax
Pajak tangguhan			Deferred tax
Perusahaan	4.552.939	(38.743.807)	The Company
Entitas anak	(2.783.865)	2.418.320	Subsidiaries
Total pajak tangguhan	1.769.074	(36.325.487)	Total deferred tax
Penyesuaian beban pajak kini tahun-tahun lalu			Adjustment on prior years current tax expenses
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	(338.661)	(79.200)	Subsidiaries
Total beban pajak	(338.661)	(79.200)	Total tax expense
Beban pajak	(13.991.300)	(55.209.041)	Tax expenses

Pajak kini

Current tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and tax loss of the Company is as follows:

	2018	2017	
	USD	USD	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	19.009.608	(158.180.637)	Profit (loss) before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Eliminasi dan penyesuaian	(59.968.481)	(20.491.273)	Elimination and adjustment
Rugi sebelum pajak Perusahaan	(40.958.873)	(178.671.910)	Loss before tax of the Company
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	(159.364)	(3.258.738)	Allowance for impairment losses of accounts receivable
Beban penyisihan penurunan nilai persediaan	605.652	1.212.870	Allowance for decline in value of inventories
Beban penyusutan	(52.120.748)	8.165.602	Depreciation expense
Penurunan nilai aset	-	(5.740.287)	Impairment of assets
Perbedaan perlakuan aset pemeliharaan	61.242.372	(84.438)	Maintenance assets
Beban imbalan pasca kerja	(2.028.344)	4.131.811	Post employment benefits
Sub-total	7.539.568	4.426.820	Sub-total
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak:			Non deductible expenses
Sewa pembiayaan	(16.791.897)	(16.578.715)	Non taxable income: Lease liabilities
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(16.432.496)	(13.558.267)	Income subjected to final tax
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	42.327.957	52.283.423	Expenses that are not deductible for tax purposes
Sub-total	9.103.564	22.146.441	Sub-total
Rugi pajak tahun berjalan	(24.315.741)	(152.098.649)	Tax losses for the year
Rugi pajak tahun sebelumnya	(256.573.757)	(104.475.108)	Tax losses from prior years
Penyesuaian rugi pajak tahun 2016	13.643.529	-	Adjustment the 2016 tax loss
Akumulasi kerugian pajak	(267.245.969)	(256.573.757)	Accumulated tax losses

The original consolidated financial statements are in the Indonesian language

Ekshibit E/44

Exhibit E/44

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018

9. PERPAJAKAN (Lanjutan)

9. TAXATION (Continued)

c. Penghasilan (beban) pajak (Lanjutan)

c. Tax income (expense) (Continued)

Rincian beban pajak dan utang (lebih bayar) pajak
kini adalah sebagai berikut:

The details of current tax expense and tax payable
(overpayment) are as follow:

	2018	2017	
	USD	USD	
Perusahaan			The Company
Beban pajak kini	-	-	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka	(1.384.736)	(1.520.539)	Less prepaid taxes
Lebih bayar pajak kini	(1.384.736)	(1.520.539)	Over payment of current tax
Entitas anak			Subsidiaries
Beban pajak kini			Current tax expense
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, Tbk	9.602.239	15.782.460	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, Tbk
PT Aero Wisata dan entitas anak	2.782.293	1.536.109	PT Aero Wisata and subsidiaries
Garuda Indonesia Holiday France	1.097.412	1.133.565	Garuda Indonesia Holiday France
PT Sabre Travel Network Indonesia	257.939	219.534	PT Sabre Travel Network Indonesia
PT Gapura Angkasa	1.681.830	132.686	PT Gapura Angkasa
Total	15.421.713	18.804.354	Total
Dikurangi pajak dibayar dimuka	(20.083.157)	(23.752.395)	Less prepaid taxes
Lebih bayar pajak kini	(4.661.444)	(4.948.041)	Over payment of current tax
Disajikan sebagai:			Presented as:
Pajak dibayar dimuka	(5.131.999)	(9.910.717)	Prepaid taxes
Utang pajak	470.555	4.962.676	Taxes payable
Bersih	(4.661.444)	(4.948.041)	Net

Pajak tangguhan

Deferred tax

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah
sebagai berikut:

Details of deferred tax assets (liabilities) are as
follows:

	01/01/2018	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss for the period	Diakui di penghasilan komprehensif lain/ Recognized in other comprehensive income	Penjabaran laporan keuangan/ Translation Adjustment	31/12/2018	
	USD	USD	USD	USD	USD	
Perusahaan						The Company
Piutang usaha	3.817.642	(38.653)	-	-	3.778.989	Trade receivables
Persediaan	378.347	151.413	-	-	529.760	Inventories
Aset tetap	(74.496.511)	(13.030.187)	(9.681.191)	-	(97.207.889)	Fixed assets
Aset tidak lancar lain-lain	8.500.589	(1.188)	-	-	8.499.401	Other non-current assets
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	21.682.449	15.310.593	-	-	36.993.042	Estimated liability for aircraft return and maintenance cost
Liabilitas imbalan kerja	9.825.043	(507.086)	(2.279.288)	-	7.038.669	Liabilities for employee benefits
Rugi pajak	64.143.440	2.668.047	-	-	66.811.487	Tax losses
Entitas anak						Subsidiaries
PT Citilink Indonesia	19.908.862	(1.887.678)	(2.609.918)	-	15.411.266	PT Citilink Indonesia
PT Sabre Travel Network Indonesia	125.944	20.986	(5.653)	-	141.277	PT Sabre Travel Network Indonesia
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	8.263.984	(1.541.199)	(1.004.941)	-	5.717.844	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
PT Aero Wisata dan entitas anak	1.677.300	944.080	298.546	(123.092)	2.796.834	PT Aero Wisata and its subsidiaries
PT Gapura Angkasa	3.615.667	(392.490)	(461.728)	(247.353)	2.514.096	PT Gapura Angkasa
PT Aero Systems Indonesia	383.308	72.436	(65.702)	(25.121)	364.921	PT Aero Systems Indonesia
Total	67.826.064	1.769.074	(15.809.875)	(395.566)	53.389.697	Total
Terdiri dari:						Consist of
Aset pajak tangguhan	69.511.409				54.178.361	Deferred tax asset
Liabilitas pajak tangguhan	(1.685.345)				(788.664)	Deferred tax liabilities

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 - Continued

Piutang ke Jasindo merupakan kelebihan premi yang dibayarkan Perusahaan ke Jasindo.

Manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak dibentuk.

Receivable to Jasindo is excess premi paid by the Company to Jasindo.

Management believes that all such receivables are collectible thus allowance for impairment losses was not provided.

8. PERSEDIAAN

	31 Desember 2016/ <u>December 31, 2016</u>	31 Desember 2015/ <u>December 31, 2015</u>	
	USD	USD	
Suku cadang	93.367.485	76.812.786	Spare parts
Jasa boga	13.408.114	12.464.443	Catering
Dokumen tiket	1.192.254	1.021.124	Ticketing document
Lain-lain	<u>3.671.127</u>	<u>3.532.656</u>	Others
Jumlah	111.638.980	93.831.009	Total
Penyisihan penurunan nilai persediaan	<u>(2.684.523)</u>	<u>(2.199.778)</u>	Allowance for decline in value
Jumlah bersih	<u>108.954.457</u>	<u>91.631.231</u>	Net amount

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016/ <u>December 31, 2016</u>	31 Desember 2015/ <u>December 31, 2015</u>	
	USD	USD	
Saldo awal	2.199.778	1.394.807	Beginning balance
Penambahan	497.502	881.582	Additions
Pemulihan	<u>(12.757)</u>	<u>(76.611)</u>	Recovery
Saldo akhir	<u>2.684.523</u>	<u>2.199.778</u>	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, persediaan Perusahaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, pihak berelasi (Catatan 45), terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar USD 86.758.093 dan USD 96.635.768. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

8. INVENTORIES

Changes in the allowance for decline in value of inventories are as follows:

Management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate to cover possible losses on the decline in inventory value.

As of December 31, 2016 and 2015, the inventories of the Company were insured with PT Asuransi Jasa Indonesia, a related party (Note 45), against fire and other risks under pool policies with total sum insured of USD 86,758,093 and USD 96,635,768, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the inventories insured.

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2017 AND 2016
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
- Continued

Piutang ke PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") merupakan kelebihan premi yang dibayarkan Perusahaan ke Jasindo.

Receivable from PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") is the excess premium paid by the Company to Jasindo.

Manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak dibentuk.

Management believes that all such receivables are collectible thus allowance for impairment losses was not provided.

8. PERSEDIAAN

	31 Desember 2017/ <u>December 31, 2017</u>
	USD
Suku cadang	117.593.836
Jasa boga	13.758.283
Dokumen tiket	1.261.702
Lain-lain	4.104.249
Jumlah	<u>136.718.070</u>
Penyisihan penurunan nilai persediaan	<u>(5.562.353)</u>
Jumlah bersih	<u>131.155.717</u>

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ <u>December 31, 2017</u>
	USD
Saldo awal	2.684.523
Penambahan	2.878.877
Pemulihan	<u>(1.047)</u>
Saldo akhir	<u>5.562.353</u>

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, persediaan Perusahaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, pihak berelasi (Catatan 45), terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar USD 99.617.637 dan USD 86.758.093. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungjawabkan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan kecuali persediaan PT Aerofood Indonesia (ACS), entitas anak, yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman fasilitas kredit pinjaman jangka panjang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") (Catatan 23).

8. INVENTORIES

	31 Desember 2016/ <u>December 31, 2016</u>	
	USD	
Spare parts	93.367.485	
Catering	13.408.114	
Ticketing document	1.192.254	
Others	3.671.127	
Total	<u>111.638.980</u>	
Allowance for decline in value	<u>(2.684.523)</u>	
Net amount	<u>108.954.457</u>	

Changes in the allowance for decline in value of inventories are as follows:

	31 Desember 2016/ <u>December 31, 2016</u>	
	USD	
Beginning balance	2.199.778	
Additions	497.502	
Recovery	<u>(12.757)</u>	
Ending balance	<u>2.684.523</u>	

Management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate to cover possible losses on the decline in inventory value.

As of December 31, 2017 and 2016, the inventories of the Company were insured with PT Asuransi Jasa Indonesia, a related party (Note 45), against fire and other risks under pool policies with total sum insured of USD 99,617,637 and USD 86,758,093, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the inventories insured.

As of December 31, 2017 and 2016, no inventories were used as collateral except inventory of PT Aerofood Indonesia (ACS), a subsidiary, which were used as collateral for the long term loan credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") (Note 23).

The original consolidated financial statements are in the Indonesian language

Ekshibit E/40

Exhibit E/40

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Penurunan nilai piutang usaha secara individu terdiri atas beberapa pelanggan yang dianggap oleh manajemen tidak terpulihkan berdasarkan penilaian atas kualitas kredit dan kondisi keuangan pelanggan tersebut. Grup tidak memiliki jaminan atas saldo tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai atas piutang kepada pihak ketiga adalah cukup. Tidak terdapat cadangan penurunan nilai atas piutang kepada pihak berelasi karena manajemen berpendapat piutang tersebut dapat ditagih.

5. TRADE RECEIVABLES (Continued)

Individually impaired trade receivables consist of accounts which management considers are no longer recoverable based on its assessment of credit quality and financial condition of the customers. The Group does not have any collateral over those balances.

Management believes that the allowance for impairment losses from third parties is adequate. No allowance for impairment loss was provided on receivables from related parties, as management believes that all such receivables are collectible.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

	31/12/2018
	USD
PT Mahata Aero Teknologi (Catatan 47)	233.134.000
PT Sriwijaya Air (Catatan 47)	30.800.000
PT Asuransi Jasa Indonesia (Catatan 45)	6.524.331
Piutang pegawai	4.496.794
Pendapatan masih harus diterima	2.662.366
Aset derivatif (Catatan 29)	513.562
Lain-lain	2.677.795
Total	280.808.848

Piutang ke PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) merupakan kelebihan premi yang dibayarkan Perusahaan ke Jasindo.

Manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga cadangan penurunan nilai tidak dibentuk.

6. OTHER RECEIVABLES

	31/12/2018	
	USD	
	-	PT Mahata Aero Teknologi (Note 47)
	-	PT Sriwijaya Air (Note 47)
	6.612.827	PT Asuransi Jasa Indonesia (Note 45)
	6.001.012	Employee receivables
	1.772.358	Accrued revenues
	26.830.643	Derivative asset (Note 29)
	1.776.564	Others
Total	42.993.404	Total

Receivable from PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) is the excess premium paid by the Company to Jasindo.

Management believes that all such receivables are collectible thus allowance for impairment losses was not provided.

7. PERSEDIAAN

	31/12/2018
	USD
Suku cadang	165.686.498
Jasa boga	13.314.538
Dokumen tiket	1.360.323
Lain-lain	4.518.553
Total	184.879.912
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(8.422.883)
Bersih	176.457.029

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	2018
	USD
Saldo awal tahun	5.562.353
Penambahan	2.862.737
Pemulihan	(2.207)
Saldo akhir tahun	8.422.883

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai persediaan.

7. INVENTORIES

	31/12/2017	
	USD	
	117.593.836	Spare parts
	13.758.283	Catering
	1.261.702	Ticketing document
	4.104.249	Others
Total	136.718.070	Total
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(5.562.353)	Allowance for decline in value
Bersih	131.155.717	Net

Changes in the allowance for decline in value of inventories are as follows:

	2017	
	USD	
Saldo awal tahun	2.684.523	At beginning of the year
Penambahan	2.878.877	Addition
Pemulihan	(1.047)	Recovery
Saldo akhir tahun	5.562.353	At end of the year

Management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate to cover possible losses on the decline in inventory value.

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 - Continued

Per 31 Desember 2016, manajemen telah dilakukan penurunan nilai atas PSS Release 15 sebesar USD 446.085 dan dibebankan di tahun berjalan.

As of December 31, 2016, PSS Release 15 was impaired amounted to USD 446,085 and charged in the current year.

Pada tanggal 31 Desember 2016, aset dalam penyelesaian terdiri dari:

As of December 31, 2016, assets under construction consisted of the following:

31 Desember 2016/ December 31, 2016		Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion
Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Jumlah kontrak/ <i>Total contract</i>		
USD	USD	%	
Perangkat lunak	21.310.971	9%	2018 Software
	<u>1.918.751</u>		
	<u>1.918.751</u>		

Beban amortisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar USD 1.674.841 dan USD 1.659.904 disajikan sebagai beban operasional jaringan.

Amortization expense for the year ended December 31, 2016 and 2015 amounted to USD 1,674,841 and USD 1,659,904, respectively, which are presented as network operation expenses.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal pelaporan.

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment of intangible assets as of reporting date.

Tidak terdapat aset takberwujud yang dijaminkan.

There were no intangible assets used as collateral.

17. ASET LAIN-LAIN- BERSIH

17. OTHER ASSETS- NET

	31 Desember 2016/ <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015/ <i>December 31, 2015</i>	
	USD	USD	
<i>Manufacturer's incentive</i>	24.356.395	10.772.919	Manufacturer's incentive
Aset program (Catatan 28)	13.708.978	11.897.495	Plan assets (Note 28)
Uang jaminan - non aircraft	7.871.689	12.048.258	Security deposits - non aircraft
Aset keuangan lainnya	4.317.783	4.032.565	Other financial assets
Aset tidak digunakan	3.691.103	3.984.755	Non productive assets
Kas yang dibatasi penggunaannya	142.402	92.787	Restricted cash
Lain-lain	7.077.029	7.399.287	Others
Jumlah	<u>61.165.379</u>	<u>50.228.066</u>	Total

Manufacturer's Incentive

Manufacturer's Incentive

Mutasi *manufacturer's incentive* adalah sebagai berikut:

Movements of *manufacturer's incentive* are as follows:

	31 Desember 2016/ <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015/ <i>December 31, 2015</i>	
	USD	USD	
Saldo awal	10.772.919	8.870.062	Beginning balance
Penambahan	26.482.000	10.810.251	Additions
Pengurangan	(12.898.524)	(8.907.394)	Deductions
Saldo Akhir	<u>24.356.395</u>	<u>10.772.919</u>	Ending balance

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 - Continued

Aset keuangan lainnya - tersedia untuk dijual

Saldo investasi tersedia untuk dijual Grup adalah sebagai berikut:

	Tempat kedudukan/ <i>Domicile</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i> %	31 Desember 2016/ <i>December 31, 2016</i> USD	31 Desember 2015/ <i>December 31, 2015</i> USD
Investasi Saham - sebesar biaya/ <i>Investments in Shares - at cost</i>				
Sabre Asia Pacific Pte., Ltd (d/h/ formerly Abacus International Ltd.)	Singapura/ <i>Singapore</i>	2,06	1.730.948	1.730.948
Papas Limited	Hongkong	17,65	1.242.816	1.242.816
PT Nusa Dua Graha International	Bali	8,00	975.593	952.137
PT Arthaloka Indonesia	Jakarta	3,00	85.428	83.205
PT Bumi Minang Padang Plaza	Padang	10,00	34.151	23.459
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>			4.068.936	4.032.565
Lainnya/ <i>Other</i>			248.847	-
Jumlah/ <i>Total</i>			4.317.783	4.032.565

Grup memiliki saham-saham tersebut dimaksudkan untuk memperoleh potensi keuntungan dalam jangka panjang karena Perusahaan tersebut bergerak dalam industri sama dengan Grup. Perusahaan tersebut tidak terdaftar di bursa efek sehingga tidak tersedia nilai wajar dari sahamnya, oleh karena itu investasi tersebut dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Aset tersedia untuk dijual lainnya milik GOHK yang dikelola oleh Industrial Bank of Korea (IBK) dalam bentuk investasi Obligasi, saham dan pasar uang sebesar.

Aset tidak digunakan

Aset tidak digunakan terdiri dari bangunan gedung Garuda Indonesia *Training Center* (GITC) dan *rotable*.

Other financial assets - available for sale

The Group available for sale investments are as follows:

The Group owns shares held primarily for long-term growth potential since such companies are engaged in the same industry similar to the Group. Those companies are non-listed and there is no readily available measure of fair value of shares thus the investment is stated at cost.

Other available for sale assets are other financial instrument owned by GOHK which is managed by Industrial Bank of Korea (IBK).

Non-productive assets

Non-productive assets consist of Garuda Indonesia *Training Center* (GITC) building and *rotables*.

	31 Desember 2016/ <i>December 31, 2016</i> USD	31 Desember 2015/ <i>December 31, 2015</i> USD	
Nilai buku - sebelum penurunan	4.242.410	4.242.410	Net carrying amount - before impairment
Penyisihan penurunan nilai aset Bersih	(551.307)	(257.655)	Provision for impairment of assets Net
	3.691.103	3.984.755	
Mutasi penyisihan sebagai berikut:			The movement of the provision is follow:
Saldo awal	(257.655)	(424.913)	Beginning balance
Perubahan bersih tahun berjalan	(293.652)	167.258	Net changes for the period
Saldo akhir	(551.307)	(257.655)	Ending balance

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015 - Continued

37. BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

	2016	2015	
	USD	USD	
Pemeliharaan dan perbaikan	134.062.106	136.121.654	Maintenance and overhaul
Suku cadang	100.073.234	77.816.176	Spareparts
Beban penyusutan	81.189.075	84.930.777	Depreciation expenses
Gaji dan tunjangan	78.052.289	61.677.238	Salaries and allowances
Sewa	13.920.493	5.746.599	Rental
Asuransi	1.421.081	1.123.329	Insurance
Bahan bakar	1.383.397	1.187.064	Fuel
Beban imbalan kerja	(18.599.295)	6.061.895	Employee benefit expenses
Lain-lain	1.806.078	1.836.229	Others
Jumlah	<u>393.308.458</u>	<u>376.500.961</u>	Total

37. MAINTENANCE AND OVERHAUL EXPENSES

38. BEBAN BANDARA

	2016	2015	
	USD	USD	
Pelayanan pesawat dan penerbangan	205.526.225	183.801.835	Aircraft and flight services
Groundhandling	85.454.193	82.610.804	Groundhandling
Gaji dan tunjangan	22.733.054	17.044.850	Salaries and allowances
Sewa	18.416.521	12.536.393	Rental
Beban penyusutan	2.124.666	2.009.723	Depreciation expenses
Beban imbalan kerja	(3.736.233)	306.641	Employee benefit expenses
Lain-lain	3.528.781	3.570.576	Others
Jumlah	<u>334.047.207</u>	<u>301.880.822</u>	Total

38. USER CHARGE AND STATION EXPENSES

39. BEBAN TIKET, PENJUALAN DAN PROMOSI

	2016	2015	
	USD	USD	
Komisi	131.535.334	127.979.180	Commissions
Reservasi	109.447.446	96.596.550	Reservations
Gaji dan tunjangan	49.475.801	42.304.171	Salaries and allowances
Iuran keanggotaan	2.172.393	1.871.080	Membership dues and subscription
Promosi	18.263.320	27.107.399	Promotions
Sewa	2.311.290	8.615.576	Rental
Beban imbalan kerja	(5.751.370)	1.190.206	Employee benefit expenses
Lain-lain	2.733.518	3.944.119	Others
Jumlah	<u>310.187.732</u>	<u>309.608.281</u>	Total

39. TICKETING, SALES AND PROMOTION EXPENSES

40. BEBAN PELAYANAN PENUMPANG

	2016	2015	
	USD	USD	
Pelayanan penumpang	175.304.944	175.727.444	Passenger services
Gaji dan tunjangan	113.038.839	87.546.996	Salaries and allowances
Pemakaian persediaan umum	1.796.960	2.581.516	General inventories consumption
Jasa profesional dan pelatihan	265.188	273.995	Professional services and training
Beban imbalan kerja	(7.218.736)	2.366.513	Employee benefit expenses
Lain-lain	3.102.571	2.253.620	Others
Jumlah	<u>286.289.766</u>	<u>270.750.084</u>	Total

40. PASSENGER SERVICE EXPENSES

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2017 AND 2016
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
- Continued

37. BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN		37. MAINTENANCE AND OVERHAUL EXPENSES	
	2017	2016	
	USD	USD	
Pemeliharaan dan perbaikan	150.084.047	134.062.106	Maintenance and overhaul
Suku cadang	112.171.593	100.073.234	Spareparts
Gaji dan tunjangan	87.439.562	78.052.289	Salaries and allowances
Beban penyusutan	56.384.495	81.189.075	Depreciation expenses
Sewa	12.342.607	13.920.493	Rental
Beban imbalan kerja	5.674.358	(18.599.295)	Employee benefit expenses
Asuransi	975.141	1.421.081	Insurance
Bahan bakar	839.757	1.383.397	Fuel
Lain-lain	3.449.651	1.806.078	Others
Jumlah	<u>429.361.211</u>	<u>393.308.458</u>	Total

38. BEBAN BANDARA		38. USER CHARGE AND STATION EXPENSES	
	2017	2016	
	USD	USD	
Pelayanan pesawat dan penerbangan	240.601.918	205.526.225	Aircraft and flight services
Groundhandling	102.898.925	85.454.193	Groundhandling
Sewa	19.445.668	18.416.521	Rental
Gaji dan tunjangan	18.005.147	22.733.054	Salaries and allowances
Beban penyusutan	2.321.815	2.124.666	Depreciation expenses
Beban imbalan kerja	(3.169.303)	(3.736.233)	Employee benefit expenses
Lain-lain	2.546.903	3.528.781	Others
Jumlah	<u>382.651.073</u>	<u>334.047.207</u>	Total

39. BEBAN TIKET, PENJUALAN DAN PROMOSI		39. TICKETING, SALES AND PROMOTION EXPENSES	
	2017	2016	
	USD	USD	
Komisi	150.998.713	131.535.334	Commissions
Reservasi	109.052.493	109.447.446	Reservations
Gaji dan tunjangan	39.167.718	49.475.801	Salaries and allowances
Promosi	16.994.208	18.263.320	Promotions
Iuran keanggotaan	2.012.415	2.172.393	Membership dues and subscription
Sewa	1.634.192	2.311.290	Rental
Beban imbalan kerja	1.267.088	(5.751.370)	Employee benefit expenses
Lain-lain	2.596.347	2.733.518	Others
Jumlah	<u>323.723.174</u>	<u>310.187.732</u>	Total

40. BEBAN PELAYANAN PENUMPANG		40. PASSENGER SERVICE EXPENSES	
	2017	2016	
	USD	USD	
Pelayanan penumpang	176.479.859	175.304.944	Passenger services
Gaji dan tunjangan	113.979.712	113.038.839	Salaries and allowances
Beban imbalan kerja	2.388.896	(7.218.736)	Employee benefit expenses
Pemakaian persediaan umum	801.709	1.796.960	General inventories consumption
Jasa profesional dan pelatihan	214.881	265.188	Professional services and training
Lain-lain	5.108.386	3.102.571	Others
Jumlah	<u>298.973.443</u>	<u>286.289.766</u>	Total

The original financial statements are in the Indonesian language

Ekshibit E/94

Exhibit E/94

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018

37. BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN		37. MAINTENANCE AND REPAIRS EXPENSES	
	2018	2017	
	USD	USD	
Pemeliharaan dan perbaikan	167,354,667	150,084,047	Maintenance and repairs
Suku cadang	148,839,744	112,171,593	Spare parts
Gaji dan tunjangan	98,399,358	87,439,562	Salaries and allowances
Beban penyusutan	92,572,288	56,384,495	Depreciation expenses
Sewa	13,308,683	12,342,607	Rental
Beban imbalan kerja	5,056,001	5,674,358	Employee benefit expenses
Asuransi	1,062,624	975,141	Insurances
Bahan bakar	701,197	839,757	Fuel
Lain-lain	2,071,396	3,449,651	Others
Total	529,365,958	429,361,211	Total
38. BEBAN BANDARA		38. USER CHARGE AND STATION EXPENSES	
	2018	2017	
	USD	USD	
Pelayanan pesawat dan penerbangan	250.663.952	240.601.918	Aircraft and flight services
Groundhandling	104.480.059	102.898.925	Groundhandling
Sewa	23.946.317	19.445.668	Rental
Gaji dan tunjangan	18.671.165	18.005.147	Salaries and allowances
Beban penyusutan	2.325.280	2.321.815	Depreciation expenses
Beban imbalan kerja	2.285.211	(3.169.303)	Employee benefit expenses
Lain-lain	2.346.560	2.546.903	Others
Total	404.718.544	382.651.073	Total
39. BEBAN TIKET, PENJUALAN DAN PROMOSI		39. TICKETING, SALES AND PROMOTION EXPENSES	
	2018	2017	
	USD	USD	
Komisi	152.614.973	150.998.713	Commissions
Reservasi	113.946.823	109.052.493	Reservations
Gaji dan tunjangan	37.277.857	39.167.718	Salaries and allowances
Promosi	14.155.162	16.994.208	Promotions
Sewa	1.448.739	1.634.192	Rental
Beban imbalan kerja	505.023	1.267.088	Employee benefit expenses
Lain-lain	4.427.938	4.608.762	Others
Total	324.376.515	323.723.174	Total
40. BEBAN PELAYANAN PENUMPANG		40. PASSENGER SERVICE EXPENSES	
	2018	2017	
	USD	USD	
Pelayanan penumpang	168.526.315	176.479.859	Passenger services
Gaji dan tunjangan	113.050.483	113.979.712	Salaries and allowances
Pemakaian persediaan umum	1.704.463	801.709	General inventories consumption
Beban imbalan kerja	1.612.005	2.388.896	Employee benefit expenses
Lain-lain	7.055.455	5.323.267	Others
Total	291.948.721	298.973.443	Total

